

**PENGARUH TEKANAN POLITIK, FAKTOR DEMOGRAFI DAN
LITERASI KEUANGAN TERHADAP PENGANGGARAN PUBLIK
DENGAN *GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE* SEBAGAI VARIABEL
MODERASI**

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan syarat meraih gelar sarjana Akuntansi
Jurusan Akuntansi pada fakultas ekonomi dan bisnis islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:
SITI NURHALIZA
90400115086

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDI MAKASSAR
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Siti Nurhaliza

Nim 90400115086

Tempat/Tgl. Lahir :Tapalang, 20 Mei

1997Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

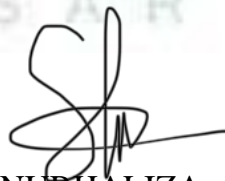
Alamat : BTP

Judul : Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan Terhadap Penganggaran Publik dengan Good Government Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kab. Mamuju)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 19 Oktober 2020

Penyusun



SITI NURHALIZA

90400115086



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 861928 Fax 861923

Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 SamataSungguminasa - GowaTlp. 841879 Fax. 8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "*Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan Good Government Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kab. Mamuju)*" yang disusun oleh Siti Nurhaliza, NIM: 90400115086, mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 April 2020, bertepatan dengan 19 Nishfu Sya'ban 1441 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Makassar, 19 Oktober 2020

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustanillyas, M.Ag.

Sekretaris : Dr. Muh.Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.

Munaqisy I : Dr. Syaharuddin, M.Si.

Munaqisy II : Jamaluddin M, SE., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Lince Bulutoding, SE.,M.Si.,Ak.

Pembimbing II : Dr. H. Abd Wahab, SE.,M.Si.

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustanillyas, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis persembahkan keharibaan Allah Rabbal Alamin, zat yang menurut Al-Qur'an kepada yang tidak diragukan sedikitpun ajaran yang dikandungnya, yang senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya dan dengan hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. yang merupakan Rahmatan Lil Alamin yang mengeluarkan manusia dari lumpur jahiliyah kepada peradaban yang islami. Semoga jalan yang dirintis beliau tetap menjadi obor bagi perjalanan hidup manusia, sehingga ia selamat dunia akhirat.

Skripsi dengan judul **“Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan *Good Government Governance* sebagai Variabel Moderasi” (Studi pada Pemerintah kabupaten Mamuju)** penulis hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar sarjana Akuntansi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Sejak awal terlintas dalam pikiran penulis akan adanya hambatan dan rintangan, namun dengan adanya bantuan moril maupun materil dari segenap pihak yang telah mampu membantu memudahkan langkah penulis. Menyadari hal tersebut, maka penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini secara khusus penulis menyampaikan terimah kasih kepada orang tua tercinta ayahanda Mahmud Muin

S, pd yang telah membesarkan saya dan segala dukungan, motivasi dan pengerbonannya, tidak pula kepada ibunda Cheristina S, pd yang telah melahirkan, mengasuh sejak kecil dengan sepenuh hati dalam buaian kasih sayang kepada penulis. Buat adek terima kasih atas segala dukungan dan selalu menyemangati

Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak diantaranya

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si. Ak selaku sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar
5. Ibu Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si. Ak selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.si selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis sampai selesai skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat.

7. Pemerintah Kabupaten Mamuju yang telah member izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2015 yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini serta telah menjadi teman yang hebat bagi penulis.
9. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, terima kasih atas persaudaraannya.
10. Saudari kandung Fariat Ulfiah yang selalu menjadi motivasi kedua terbesar kedua setelah orang tua kami agar selalu menjadi lebih baik dan membahgiakan orang tua kami dan menjadi anak yang sholeh.
11. Sahabat SHINOT yaitu Nisa, Uny, Kurnia dan Kiki. Terima kasih atas segala motivasi dan bantuannya selama penyelesaian skripsi ini, dan terima kasih telah menjadi sahabat yang hebat bagi penulis.
12. Saudara-saudariku, Hikma, Fadel, Reza, Salahuddin, Suci, Sinar, Arfah, Hamdayani, anti, musfika sari, Aulia, dan Jalil yang selalu ada dan senantiasa membimbing dan Memotivasi dalam menyelesaikan skripsi.
13. Semua keluarga, teman-teman dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Akhirnya dengan segala keterbukaan dan ketulusan, skripsi ini penulis persembahkan sebagai upaya maksimal dan memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada UIN Alauddin Makassar dan semoga skripsi yang penulis persembahkan ini bermanfaat adanya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. dan kekurangan tentu datanganya dari penulis. Kiranya dengan semakin bertambahnya wawasan dan pengetahuan, kita semakin menyadari bahwa Allah adalah sumber segala ilmu pengetahuan sehingga dapat menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT

Penulis

Siti Nurhaliza
90400115086



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengembangan Hipotesis.....	8
D. Defenisi operasional dan Ruang lingkup penelitian.....	15
E. Kajian Pustaka.....	20
F. Tujuan Penelitian.....	27
G. Manfaat Penelitian.....	28
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	30
A. <i>Agency Theory</i>	30
B. <i>Grabbing Hand Theory</i>	31
C. Tekanan Politik.....	32
D. Faktor Demografi.....	34
E. Literasi Keuangan.....	34
F. Penganggaran Publik.....	35
G. <i>Good Government Governance</i>	37
H. Kerangka Pikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	44

E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Instrumen Penelitian.....	45
G. Metode Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Hasil Penelitian.....	55
C. Uji Kualitas Data.....	65
D. Analisis Data.....	68
E. Pembahasan Penelitian.....	79
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Keterbatasan Penelitian.....	88
C. Implikasi Penelitian.....	89
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Operasional Variabel.....	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Skala Likert.....	45
Tabel 3.2 Tabel Penentu Moderasi.....	49
Tabel 4.1 Bupati Mamuju tahun 1960-sekarang.....	51
Tabel 4.2 Data Distribusi Kuesior.....	55
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	56
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	56
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	57
Tabel 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	58
Tabel 4.7 Statistik Deskriptif Variabel.....	58
Tabel 4.8 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Tekanan Politik.....	60
Tabel 4.9 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Faktor Demografi.....	61
Tabel 4.10 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Literasi Keuangan.....	62
Tabel 4.11 Deskripsi Item Pernyataan Variabel GGG.....	63
Tabel 4.12 Deskripsi Item Pernyataan Variabel Panganggaran publik.....	64
Tabel 4.13 Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 4.14 Hasil Uji Reliabilitas.....	67
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinan R Model Summary.....	68
Tabel 4.16 Hasil Uji F-Uji Simultan ANOVA A ^a	69
Tabel 4.17 Hasil Uji T Hitung Coefficients ^a	69
Tabel 4.18 Hasil Uji Koefisiens Determinasi (R ²) Model Summary.....	73
Tabel 4.19 Hasil Uji F-Uji Simultan ANOVA.....	74
Tabel 4.20 Hasil Uji Parsial Regresi Moderasi Coefficients.....	75
Tabel 4.21 Ringkasan Hasil Penelitian.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Fikir.....	40
--------------------------------	----



ABSTRAK

NAMA : SITI NURHALIZA
NIM : 90400115086
JUDUL : **Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan *Good Government Governance* sebagai variabel Moderasi Pada Pemerintahan Kabupaten Mamuju**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Tekana Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran publik dengan *good government governance* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di SKPD Kabupaten Mamuju. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 68 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner secara langsung. Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dan *Moderated Regression Analysis*

Hasil penelitian dengan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa Tekanan Politik, Faktor demografi dan Literasi Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap proses penganggaran publik. Sedangkan. Analisis variabel moderating dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* menunjukkan bahwa *good government governance* mampu memoderasi *Literasi* Keuangan. Sedangkan *good government governance* tidak mampu memoderasi Tekanan Politik dan Faktor Demografi terhadap Penganggaran publik. implikasi dalam penelitian ini bagi penyusun anggaran diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance*. Begitupun untuk pemerintah pemerintah Kabupaten Mamuju diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia dalam mencegah perilaku-perilaku yang dapat merugikan banyak pihak. Sehingga program kerja yang dihasilkan mampu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.

Kata Kunci: Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi, Penganggaran Publik, *Good Government Governance*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Otonomi daerah adalah pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dengan harapan memberi dampak positif bagi kepentingan publik dalam menciptakan strategi pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan juga mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Mardiasmo, 2004). Selain itu lahirnya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra dan Maryati, 2009).

Fenomena ini berkaitan dengan perilaku politik dari pejabat politik maupun pejabat daerah yang dimana merasa terganggu atau tidak suka dengan transparansi anggaran, karena hal tersebut secara tidak langsung akan mengurangi otoritas yang selama ini di nikmati, persoalan yang berkaitan dengan aturan-aturan formal yang ada, bahwa masing-masing pihak dan lembaga memiliki batas kewenangan serta prosedurnya sendiri. Kendali inilah yang menyebabkan alokasi anggaran dalam APBD seringkali tidak mencerminkan keterpihakan kepada publik.

Di mata masyarakat kinerja pemerintah selalu menjadi suatu perhatian besar dan masyarakat pun sering melakukan penilaian atas hasil capaian pelaksanaan suatu program kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Salah satu tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk memaksimalkan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Penilaian kinerja pemerintah tidak dapat dilakukan berdasarkan besar/kecilnya laba/keuntungan yang diperoleh, karena pemerintah bukan entitas bisnis yang menilai kinerja berdasarkan laba. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan yang buat setiap akhir periode, sedangkan untuk mengukur kinerja non keuangan dapat dilakukan dengan menilai sejauh mana pemerintah dapat mencapai apa yang telah ditargetkan dan sejauh mana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang memengaruhi kesejahteraannya (Lusardi, 2009). Pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keuangan yang baik maka ketika membuat keputusan tentang keuangan tidak mengalami masalah di masa depan sehingga mampu menunjukkan

perilaku keuangan yang sehat untuk menentukan prioritas kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan. Xu dan Zia (2012) mendefinisikan literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk-produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan. Pada negara berpenghasilan tinggi, literasi keuangan dianggap sebagai pelengkap dari perlindungan konsumen. Sedangkan pada negara berpenghasilan rendah, jangkauan keuangan jauh lebih terbatas. Peranan literasi keuangan yang akan membantu negara berkembang untuk lebih fokus meningkatkan akses keuangan serta pelayanan keuangan.

Anggaran berbasis kinerja di Indonesia telah diperkenalkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara yang menjelaskan bahwa rencana kinerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Penjelasan Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa anggaran berbasis prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses anggaran disektor publik. dengan disahkannya permendagri no 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan daerah (Bastian, 2006). Sesuai dengan permendagri no 13 tahun 2006 penganggaran yang baik akan memberikan dasar bagi pengukuran kinerja yang valid dan akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja untuk mengendalikan.

Anggaran berbasis kinerja *konsep budgeting* sebagai prosedur atau mekanisme yang dimaksudkan untuk memperkuat kaitan antara dana yang diberikan kepada entitas sektor publik dengan *outcome* mereka melalui penggunaan informasi kinerja yang formal dengan pengambilan keputusan alokasi sumber daya.

Dimana anggaran tersebut berfokus pada aktivitas atau fungsi yang memproduksi hasil dan sumber daya yang digunakan serta memperkanalkan proses anggaran yang berusaha untuk menghubungkan tujuan organisasi dengan sumber daya. Pada dasarnya tujuan utama anggaran berbasis kinerja ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja publik dan GAO mendefinisikan anggaran berbasis kinerja sebagai konsep yang mengaitkan informasi kinerja dan anggaran.

Selain *good government governance* yang diduga mempengaruhi kinerja pemerintah adalah ukuran legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas melakukan peningkatan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah, yang akhirnya terbentuk titik temu bahwa semakin besar anggota legislatif maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah atau sebaliknya (Sumarjo, 2010). Kusumawardani (2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa secara logika semakin tinggi tingkat pengawasan maka semakin tinggi pula tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja. Tingkat kemauan dalam bekerja inilah yang akan mempengaruhi perolehan hasil yang menunjukkan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah daerah memerlukan pengelolaan perusahaan yang baik atau *good corporate governance* sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Handi dan Bambang (2016) mengatakan bahwa “kinerja sebuah pemerintah daerah akan lebih baik bila prinsip-prinsip *good government governance* diterapkan pada pemerintah daerah”. Maka secara tidak langsung *good government governance* pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemajuan kinerja pada suatu pemerintah daerah di provinsi sehingga dapat disimpulkan bahwa *good government governance*

memiliki pengaruh pada kinerja pemerintah daerah. Dengan prinsip-prinsip *good Governance* akan memberikan keyakinan yang memadai bahkan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memperingatkan kepada kaum muslimin untuk tidak mengambil harta orang lain dengan cara batil. Dalam hal ini kau muslim dilarang mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang sah seperti jual-beli. Keadilan Allah dan kejelian pengawasannya seluruh amal manusia akan terbalas dengan sempurna. Mengenai pengawasan juga dijelaskan dalam QS: Al-Israa' Ayat 13-14, yakni:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا

(۱۳) قَرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱۴)

Terjemahan:

“Dan setiap manusia telah kami kalungkan (catatan) amal perbuatan di lehernya. Dan pada hari kiamatn kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu". (Departemen Agama RI, 2010: 283).

Karna itu tiada alasan untuk tidak melakukan perbuatan baik, sebagaimana tidak ada alasan untuk melanggar larangan Allah. Dalam hal pengelolaan keuangan publik. Implementasi ayat tersebut berupa sikap pertanggungjawaban (Akuntabilitas) dan keterbukaan (transparansi) kepada publik tentang pengelolaan keuangan dengan *output* berupa laporan keuangan pemerintah. Dengan berdasarkan

dari ayat tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk lebih *akuntabel* dan transparan kepada publik tentang bagaimana pengelolaan keuangan pusat maupun di daerah serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan mengenai perubahan jumlah, persebaran dan komposisi atau struktur penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen utama pertumbuhan penduduk yaitu, fertilitas, mortalitas dan migrasi. Secara menyeluruh demografi memberi gambaran tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok (Yasin & Adiotomo, 2010 : 3). dan peluang keuangan.

Faktor demografi terdiri dari usia, pendidikan dan pendapatan. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi *real income* individu atau rumah tangga. *Personal income* adalah penghasilan pribadi sebelum dikurangi pajak. *Personal income* diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji.

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Seperti uraian latar belakang di atas bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga perlu di kaji lebih lanjut dan digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Tekanan Politik berpengaruh signifikan terhadap penganggaran publik ?
2. Apakah Faktor Demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik ?
3. Apakah Literasi Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik ?
4. Apakah *good goverment governance* mampu memoderasi hubungan antara tekanan politik terhadap penganggaran publik ?
5. Apakah *good goverment governance* mampu memoderasi hubungan faktor demografi terhadap penganggaran publik ?
6. Apakah *good goverment governance* mampu memoderasi literasi keuangan terhadap penganggaran publik ?

C. Hipotesis

1. Pengaruh Tekanan politik terhadap Penganggaran Publik

Dalam proses formal perundang-undangan tentang mekanisme anggaran sudah dibuat, namun masih terjadi penyalahgunaan anggaran, bahkan proses perumusannya masih didominasi kepentingan elit. Proses tersebut hanya dimaknai sebagai proses formal dan masih jauh dari nilai-nilai keadilan dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dinamika proses penentuan anggaran baik ditingkat pusat sampai pada tingkat lokal, fakta berbicara di lapangan bahwa pihak elit-elit yang terlibat dalam proses politik anggaran, yang terjadi adalah bagaimana elit politik melakukan tawar-menawar besaran anggaran tersebut milik siapa dan kepada siapa anggaran tersebut. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yuhertiana *et al.* (2015) yang mengatakan aspek psikologi, sosiologi, politik dan perilaku disfungsi berhimpitan dalam tahap perencanaan anggaran. Partisipasi anggaran yang melibatkan masyarakat banyak ditemukan sebagai formalitas semu menyebabkan adanya kecenderungan moral hazard. Hal tersebut juga diperkuat Wance dan Suranto (2017) dalam penelitiannya yang mengatakan bahwa faktor-faktor yang sangat berpengaruh keterlambatan penetapan anggaran yaitu *Personal background*, *Political background* dan pemahaman anggota DPRD tentang pengelolaan anggaran, hal ini disebabkan karena latar belakang individu dalam aktivitas politik.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Tekanan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap proses penyusunan anggaran publik.

2. Pengaruh Faktor Demografi terhadap Penganggaran Publik

Dalam perilaku pengelolaan keuangan terdapat banyak macam faktor yang bisa mempengaruhinya, salah satunya adalah faktor demografi. Faktor demografi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangan yang dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia pendapatan.

Menurut Harli, dkk (2015) karakteristik demografi meliputi umur, jenis kelamin, pendidikan, keluarga, dan keuangan keluarga.

Menurut Donald J. Bogue (1969) demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk dan perubahan- perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (fertilitas), mortalitas (kematian), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial (Adioetomo, 2010: 3) Oleh karena itu demografi merupakan alat untuk mempelajari perubahan kependudukan, dimana perubahan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan penduduk seperti fertilitas, mortalitas dan imigrasi.

Sistem penganggaran, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), penganggaran terpadu (*unified budget*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Konsepsi *performance based budgeting* sendiri menekankan bahwa alokasi anggaran harus dioptimalkan untuk menghasilkan outcome yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat (*people need*).

H2: Faktor demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik

3. Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Penganggaran Publik

Kompetensi seseorang untuk pengelolaan keuangan merupakan keahlian dan kemampuan yang terbentuk untuk memanfaatkan sumber daya dalam pencapaian suatu tujuan. Dimensi yang tidak dapat terpisahkan dari literasi keuangan adalah pengetahuan finansial seseorang (Huston, 2010). Beberapa pendapat lain tentang

indikator yang mempengaruhi literasi keuangan adalah penganggaran, tabungan, pinjaman, dan investasi (Remund, 2010) menyimpulkan terdapat empat indikator yang paling umum mempengaruhi literasi keuangan. Hal-hal yang berhubungan dengan literasi keuangan adalah bagaimana pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, berinvestasi, pinjaman atau kredit serta pengelolaan tabungan. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan, tetapi juga atribut non kognitif (PISA, 2012).

penganggaran publik umumnya menyesuaikan dengan peraturan organisasi yang berlaku. Pada organisasi pemerintahan di Indonesia, proses penyusunan anggaran disesuaikan dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimana pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Arisusanti dkk (2017) Anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Dengan demikian literasi keuangan mempengaruhi penganggaran publik karena pengelolaan keuangan merupakan keahlian dan kemampuan yang terbentuk untuk memanfaatkan sumber daya dalam pencapaian suatu tujuan.

H3: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik.

4. *Good Government Governance* memoderasi pengaruh tekanan politik terhadap Penganggaran Publik

Tekanan politik yang terjadi dalam proses penganggaran memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk dari politik memberikan dampak yang besar bagi proses penyusunan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran harus didasarkan pada ketentuan yang ada dan dilaporkan sesuai dengan kaidah administrasi keuangan yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akuntabel dan transparan. Brautigam (2002) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan aktor sosial dan politik lainnya yang terlibat dalam dunia politik memiliki banyak suara dalam reformasi, sehingga retorika partisipatif jauh lebih simbolis dibandingkan dengan hakikatnya. Demikian pula bagi mereka yang sedang menjalankan tugas di lingkungan pemerintahan, *political pressure* menjadi bagian yang melekat dan dikategorikan sebagai cara untuk menantang suatu praktik sesungguhnya (Karki, 2017). Hakikatnya, tekanan politik hanya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bukan sebagai gangguan.

Proses penyusunan anggaran publik saat ini dan kedepan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan. *Good Government Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi demi mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik. Indikator yang meliputi elemen-elemen penting dalam *good governance* adalah transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan keadilan (Yusniyar dkk., 2016). Prinsip akuntabilitas dalam konsep *Good Government Governance* mencakup eksistensi dari suatu mekanisme yang meyakinkan politisi dan pejabat

pemerintahan terhadap aksi perbuatannya dalam penggunaan sumber-sumber publik dan kinerja perilakunya. Aplikasi akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan anggaran publik sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan.

H4: *Good government governance* memoderasi hubungan antara Tekanan Politik dengan proses penyusunan anggaran publik.

5. Pengaruh *good government governance* dapat memoderasi faktor demografi terhadap penganggaran publik

Good government governance merupakan paradigma yang baru dan berkembang di Negara kita saat ini. *good government governance* merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya saling control yang dilakukan oleh beberapa komponen yang terkait yaitu pemerintah, rakyat, ataupun usahawan yang beradap disektor swasta. Komponen yang berkaitan ini memiliki hubungan yang sama dan sederajat. Bila kesamaan derajat tersebut tidak sebanding dan tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah yang saat ini telah berpindah dari *government* ke *governance*, dengan mengutamakan kepentingan public. Beberapa kata

Menurut Donald J. Bogue (1969) demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik jumlah, komposisi, distribusi penduduk dan perubahan- perubahannya sebagai akibat bekerjanya komponen-komponen pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran (fertilitas), mortalitas (kematian), perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial (Adioetomo, 2010: 3) Oleh karena itu demografi merupakan alat untuk mempelajari perubahan kependudukan, dimana

perubahan tersebut dipengaruhi oleh komponen pertumbuhan penduduk seperti fertilitas, mortalitas dan imigrasi.

sistem penganggaran, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*), penganggaran terpadu (*unified budget*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*). Konsep *performance based budgeting* sendiri menekankan bahwa alokasi anggaran harus dioptimalkan untuk menghasilkan outcome yang ditujukan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat (*people need*).

H5: *Good government governance* memoderasi hubungan faktor demografi dengan penganggaran publik.

6. Pengaruh *good government governance* dapat memoderasi literasi keuangan terhadap penganggaran publik

Literasi keuangan merupakan kemampuan bagi seseorang untuk membaca, menganalisis, mengelola dan mengkomunikasikan kondisi keuangan yang memengaruhi kesejahteraannya (Lusardi, 2009). Pemahaman mengenai konsep-konsep dasar keuangan yang baik maka ketika membuat keputusan tentang keuangan tidak mengalami masalah di masa depan sehingga mampu menunjukkan perilaku keuangan yang sehat untuk menentukan prioritas kebutuhan bukan hanya sekedar keinginan. Xu dan Zia (2012) mendefinisikan literasi keuangan mencakup konsep yang dimulai dari kesadaran dan pemahaman tentang produk – produk keuangan, institusi keuangan, dan konsep mengenai keterampilan keuangan. Pada negara berpendapatan tinggi, literasi keuangan dianggap sebagai pelengkap dari perlindungan konsumen. Sedangkan pada negara berpendapatan rendah, jangkauan keuangan jauh lebih terbatas. Peranan literasi keuangan yang akan membantu

negara berkembang untuk lebih fokus meningkatkan akses keuangan serta pelayanan keuangan.

Good government governance merupakan paradigma yang baru dan berkembang di Negara kita saat ini. *good government governance* merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya saling control yang di lakukan oleh beberapa komponen yang terkait yaitu pemerintah, rakyat, ataupun usahawan yang beradap disektor swasta. Komponen yang berkaitan ini memiliki hubungan yang sama dan sederajat. Bila kesamaan derajat tersebut tidak sebanding dan tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah yang saat ini telah berpindah dari *government* ke *governance*, dengan mengutamakan kepentingan public. Beberapa kata

H6: *Good government governance* memoderasi hubungan literasi keuangan dengan proses penganggaran publik.

A. Definisi Operasional dan Ruang Penelitian

1. Definisi operasional

a. Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini variabel dependen adalah proses penyusunan anggaran publik. Anggaran sektor pemerintah berguna bagi pemerintahan sebab anggaran adalah panduan untuk membangun social economy, menyelaraskan, dan untuk peningkatan kualitas hidup orang banyak (Sari dan Putra, 2017). Anggaran diperlukan sebabada kebutuhan ataupun keinginan publik yang tak terbatas dan selalu berkembang..

b. Variabel Independen

1) Tekanan Politik

Pada penelitian Brautigam (2002) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan aktor sosial dan politik lainnya yang terlibat dalam dunia politik memiliki banyak suara dalam reformasi, sehingga retorika partisipatif jauh lebih simbolis dibandingkan dengan hakikatnya. *Political pressure* yang terjadi dalam proses penganggaran memang tidak bisa dihindari. hal ini dikarenakan bentuk-bentuk dari politik memberikan dampak yang besar bagi proses penyusunan anggaran. Lembaga politik yang terwakilkan legislatif dapat menggunakan pengaruh politiknya dengan mendistribusikan anggaran dengan lebih mudah.

2) Faktor Demografi

Rita dan Kusumawati (2010) menyatakan faktor demografi terdiri dari gender, usia, tingkat pendidikan, status perkawinan, pekerjaan, jabatan, dan pendapatan. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi *real income* individu, sama halnya dengan tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh, akan tetapi selain pendidikan formal, kemampuan kognitif memiliki peran untuk meningkatkan pengetahuan keuangan.

3) Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang agar terhindar dari masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan hanya fungsi dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan), kesulitan keuangan juga dapat muncul

jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*miss-management*) seperti tidak adanya perencanaan keuangan dan keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres, dan rendahnya kepercayaan diri seseorang.

c. Variabel Moderasi

Variabel moderasi adalah variabel penghubung antar variabel x ke y. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance*. *Good Government Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang baik. Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (*government*), rakyat (*citizen*) atau *civil society* dan usahawan (*business*) yang berada di sektor swasta. Ketiga komponen itu memiliki tata hubungan yang sama dan sederajat. Jika kesamaan derajat tersebut tidak sebanding atau tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata pemerintahan yang baik.

Ringkasan definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala Pengukuran	Sumber
1	2	3	4
Variabel Independen Tekanan	a. Keunggulan kekuasaan	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Romarina dan

Politik (X ₁)	(<i>discretionary power</i>) dan perilaku oportunistik oknum legislatif.		Makhfathih (2010)
Faktor Demografi (X ₂)	<p>b. Hubungan eksekutif dan legislatif terkait mekanisme perumusan dan pembahasan APBD</p> <p>a. Pendidikan</p> <p>b. Gender</p> <p>c. Usia</p> <p>d. Jabatan</p> <p>e. Lama bekerja</p>	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Andrew (2014)
Literasi Keuangan (X ₃)	<p>a. Memahami konsep keuangan</p> <p>b. Memahami produk keuangan</p>	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Raaij (2016)

	c. Kemampuan menggunakan pengetahuan keuangan		
Variabel Moderasi			
<i>Good Government Governance</i> (M)	1) Keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat dan pemakai lainnya. 2) Pengambilan keputusan yang demokratis menilai pertanggung jawaban.	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Zeyn (2011)
Variabel Independen			
Penganggaran Publik (Y)	1) Wewenang dalam memutuskan kegiatan yang diperlukan dalam anggaran 2) Pendapat atau masukan merupakan faktor penting dalam	Ordinal (<i>Likert Scale 5 Poin</i>)	Yanida dkk. (2013)

	<p>pelaksanaan anggaran</p> <p>3) Wewenang unit organisasi dan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan untuk melaksanakan</p>		
--	---	--	--

2. Ruang Lingkup Penelitian

penelitian ini dirancang untuk menguji pengaruh antara variabel independen yaitu, pengaruh tekanan politik, faktor demografi, dan literasi keuangan terhadap penganggaran publik dengan *good goog goverment governance* sebagai pemoderasi. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

A. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penganggaran publik telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun pada penelitian ini, peneliti ingin menguji bagaimana pengaruh tekanan politik, faktor demografi, dan literasi keuangan terhadap penganggaran publik dengan *good goog goverment governance* sebagai pemoderasi.

Tabel 1.2

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Terdahulu	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
----	-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------

	(Nama dan Tahun)			
1.	Pratiwi (2018)	Politisasi Anggaran Sektor Publik	Jenis penelitian dalam jurnal ini adalah kuantitatif dengan pendekatan studi kasus. Dimana peneliti mengkaji sebuah fenomena atau persoalan secara mendalam dalam konteks lingkungan tertentu.	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peranan departemen manajer dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. 2. Prosedur birokratik, penuh dengan kontek politik. 3. Pada tahap ratifikasi, komite anggaran tidak memperhitungkan uji relevansi, uji urgensi, uji efektivitas biaya. Tapi memiliki concern dengan politik yang lebih tinggi. <p>Perlemen lokal sebagai proxy publik tidak berkelahi untuk anggaran publik sehingga politisasi</p>

				anggaran terjadi demi fungsionaris.
2	Raja Ria Yusnita dan Muhammad Abdi (2018)	Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Literasi Keuangan	Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif	Hasil pengujian untuk melihat apakah faktor demografi yang terdiri dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan lama berusaha dan usia berpengaruh secara signifikan terhadap literasi keuangan pada pelaku UMKM bengkel sepeda motor di Kec.Siak Hulu Kab. Kampar menunjukkan bahwa dari empat variabel yang diuji tersebut, terdapat tiga variabel yang tidak signifikan yaitu tingkat pendidikan, lama berusaha, dan usia yang memiliki nilai signifikan.

3	Sulton (2015)	Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus, Secara skematis riset ini dilakukan dengan 5 tahapan: tahap observasi dan penelusuran dokumen; tahap wawancara; tahap komparasi data; tahap penentuan pola; tahap generalisasi.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Realitas politik menunjukkan karena keterbatasan sumberdaya, penentuan alokasi dan pengelolaan dana hibah dan bansos di kabupaten Ponorogo tahun 2013 masih menjadi arena kontestasi dan cerminan kekuatan relatif para aktornya yang memiliki preferensi berbeda atas hasil anggaran (lihat Rubin, 2000:4). Meskipun eksekutif memiliki otoritas atas teknis pengelolaannya, tetapi longgarnya mekanisme penetapan penerima dan pengelolaan dana hibah-bansos menjadikannya sebagai arena kaplingan legislatif,
---	---------------	---	--	--

				<p>melalui manuver dan intervensi politiknya sejak penetapan pada KUA-PPAS sampai dengan penetapan APBD. Sementara, eksekutif tetap berusaha mengendalikan proses penganggaran dengan berbagai legitimasinya, sehingga memaksa eksekutif akomodatif dan responsif atas kepentingan anggaran legislatif yang merepresentasikan konstituen pada dapil masing-masing</p>
4	M. Syareza L. Tobinga dan Bambang P. S. Brodjonegoro (2013)	Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antar pemerintah Indonesia	Jenis penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif	<p>Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa, ditemukannya hubungan yang negatif dan</p>

				<p>signifikan terhadap proporsi kursi yang dimiliki Partai Demokrat dengan DAU per kapita yang didapatkan oleh masing-masing provinsi justru memperkuat dukungan akan tidak adanya determinan politik dalam penentuan alokasi DAU. Hal ini didukung oleh model teori Grossman (1994) yang menjadi acuan studi, di mana masyarakat baru akan memberikan tanggapan positif apabila mereka dapat mengetahui asal dari dana (baik dalam bentuk peningkatan pelayanan publik maupun kas langsung) yang mereka terima.</p>
--	--	--	--	--

				Terkait hal ini, sulit bagi masyarakat masing-masing provinsi untuk mengetahui bahwa peningkatan dana yang mereka terima, karena DAU sudah menjadi bagian dari APBD masing-masing provinsi
5	Purnomo dan Ulyani (2016)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi kinerja Anggaran pada pemerintah Kabupaten Lebak.	Menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.	Menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan tekanan eksternal, komitmen organisasi dan pemahaman sistem prosedur pengelolaan keuangan terhadap kinerja anggaran pada kabupaten Lebak.
6	Saputro dkk. (2016)	Faktor yang Mempengaruhi Ketetapan Anggaran Sektor Publik	Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan ketidakpastian lingkungan

			pendekatan <i>explanatory</i>	berpengaruh signifikan negatif pada akurasi Anggaran dan komitmen dari kualitas organisasi dan anggaran memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap akurasi anggaran
7	Maulamin dkk. (2018)	Pengaruh prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan aset Kabupaten Pandegelang Provinsi Banten	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verikatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran pada instansi pemerintah

8	Dewi dkk. (2015)	Pengaruh Tekanan Eksternal Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (studi kasus pada SKPD Kabupaten Karangasem)	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal dan faktor politik tidak berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan. Namun komitmen manajemen berpengaruh terhadap penerapan transparansi pelaporan keuangan.
---	---------------------	---	---	--

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah tekanan politik berpengaruh terhadap penganggaran publik.
2. Untuk mengetahui apakah faktor demografi berpengaruh terhadap penganggaran publik.
3. Untuk mengetahui apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap penganggaran publik.

4. Untuk mengetahui apakah *Good Government Governance* mampu memoderasi hubungan antara tekanan politik terhadap penganggaran publik.
5. Untuk mengetahui apakah *Good Government Governance* mampu memoderasi hubungan antara faktor demografi terhadap penganggaran publik.
6. Untuk mengetahui apakah *Good Government Governance* mampu memoderasi hubungan antara literasi keuangan terhadap penganggaran publik.

C. *Manfaat Penelitian*

1. Manfaat Teoritis

Teori agensi digunakan dalam penyempurnaan penelitian ini. implikasi penerapan teori agensi menimbulkan hal positif berbentuk efisiensi, tetapi lebih mendominasi menimbulkan perilaku opportunistik. Hal ini disebabkan karena agen lebih banyak memiliki informasi dari pada prinsipal. Teori agensi lahir untuk memperlihatkan adanya asimetri informasi antara pihak legislatif maupun eksekutif dengan masyarakat. Berbagai konflik muncul dalam proses penyusunan anggaran, dengan adanya teori diharapkan dapat memberikan jawaban mengenai apa penyebab timbulnya konflik kepentingan yang ada.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai bahan untuk membandingkan apa yang didapatkan dalam dunia kampus dengan dunia yang sesungguhnya yakni dunia kerja. Selain hal tersebut,

skripsi ini juga dapat di jadikan bahan untuk menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai “pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografidan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan *good government governance* sebagai variabel moderarsi”.

b. Bagi Pihak Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini sangat diharapkan mampu memberikan dasar/gambaran bagaimana penganggaran publik. Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi para pegawai yang terlibat dalam penganggaran public, lebih mengetahui dan mengerti apa-apa saja faktor yang mempengaruhi penganggran public itu sendiri.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Agency Theory*

Agency Theory dikemukakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. *Agency theory* adalah salah satu hal yang mendasar dalam dunia akuntansi. Teori ini memfokuskan pada masalah keagenan yang terjadi ketika ada hubungan keagenan antara *principal* dan *agent*. *Agency theory* berasal dari asumsi bahwa individu memaksimalkan tingkat kepuasan yang diharapkan melalui kemampuan sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak sehingga pengungkapan yang dikeluarkan berdasarkan acuan pada *agency theory* merupakan sebagian dari manfaat yang diharapkan oleh individu dengan suatu tindakan tertentu (Angraeni, 2011). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Dalam teori agensi menjelaskan mengenai bagaimana atasan mendelegasikan pekerjaan kepada bawahan dan bawahan melaksanakan tugas untuk mencapai kepentingan atasan, kemudian hubungan antara atasan dan bawahan menimbulkan masalah atau yang disebut *agency problem* (Syahrir, 2017).

Akibat yang muncul dari penerapan teori agensi bisa menimbulkan hal yang positif dalam hal ini efisiensi, namun lebih banyak menimbulkan sesuatu yang negative seperti perilaku oportunistik. hal ini terjadi dikarenakan pihak agensi mempunyai informasi yang lebih luas dari pada prinsipal, sedangkan dari pihak prinsipal memanfaatkan kepentingan pribadinya karena memiliki keunggulan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Latifah (2010) Adanya asimetri

informasi di antara eksekutif-legislatif dan legislatif-pemilih menyebabkan terbukanya ruang bagi terjadinya perilaku oportunistik dalam proses penyusunan anggaran. Masalah yang timbul di area eksekutif lebih condong untuk memaksimalkan kepentingan peribadinya untuk membuat ataupun menyusun anggaran, sebab pihak eksekutif memiliki keunggulan informasi. Mengenai hal tersebut eksekutif juga akan lebih condong melakukan *budgetary slack*. Ini semua terjadi karena pihak eksekutif mengamankan posisinya dalam sebuah pemerintahan dimata legislatif dan rakyat, bahkan untuk kepentingan pemelihan kepala daerah berikutnya.

B. *Grabbing Hand Theory*

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Shleiver dan Vishny (1997) dan menganggap bahwa tokoh politik adalah politisi dan birokrat yang mengambil keuntungan dari posisi mereka di pemerintahan untuk mengambil manfaat pribadi. Pemerintah digambarkan sebagai *grabbing hand* yang dikendalikan oleh politisi yang tidak memaksimalkan kesejahteraan sosial dan lebih memilih untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Pembuat kebijakan juga merupakan seorang politisi yang sebelumnya dipilih oleh masyarakat, oleh karena itu mereka tentunya harus menyenangkan atau mengambil simpati dari masyarakat atau para pemilih agar memilih mereka pada pemilu. Pemerintah “*grabbing hand*” cenderung memberi keuntungan hanya kepada kelompok kepentingan kecil tapi terorganisir dengan baik.

Banyak fenomena penyimpangan yang terkuak yang telah ditemukan oleh Audit Tertinggi Badan (BPK) dalam melakukan audit laporan keuangan

pemerintah, yang membuat publik menuntut peningkatan kinerja pemerintah yang baik (Idward dkk. 2018). *Grabbing hand* dimaknai sebagai perebutan kekuasaan oleh para kaum elit yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibanding dengan kepentingan publik. Hal inilah yang kemudian menciptakan demokrasi palsu, sebab pembangunan tidak lebih sebagai gagasan dan kepentingan elit belaka (Zuhriansyah, 2013). Proses anggaran seharusnya disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menjadi dasar dalam pengelolaan anggaran yang tranparan dan akuntabel. Dengan demikian, berbagai polemik dalam penganggaran bisa diatasi.

C. Tekanan Politik

Perumusan kebijakan anggaran adalah bagian penting dari sebuah proses kebijakan publik, karena dalam tahap ini dapat dilihat bagaimana proses kompromi dan politik untuk menemukan solusi dari sekian banyak alternatif kebijakan yang diberikan. Proses pengelolaan anggaran perlu ditunjang dengan upaya penguatan daya saing perekonomian, penguatan infrastruktur fisik dan sosial, serta pengendalian inflasi (Hariyadi, 2016). Upaya tersebut mampu menjadi modalitas yang penting apalagi saat terjadinya stabilitas politik yang kuat bagi pengamatan program-program prioritas pemerintah kedepannya. Kehadiran tekanan politik sudah tidak diragukan lagi mengingat adanya bentuk negoisiasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan (Grant, 2001). *Political pressure* yang terjadi dalam proses penganggaran memang tidak bisa dihindari. hal ini dikarenakan bentuk-bentuk dari politik memberikan dampak yang besar bagi proses penyusunan anggaran.

Sebagaimana diketahui bahwa anggaran harus didasarkan pada ketentuan yang ada dan dilaporkan sesuai dengan kaidah administrasi keuangan yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akuntabel dan transparan.

Brautigam (2002) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan aktor sosial dan politik lainnya yang terlibat dalam dunia politik memiliki banyak suara dalam reformasi, sehingga retorika partisipatif jauh lebih simbolis dibandingkan dengan hakikatnya. Demikian pula bagi mereka yang sedang menjalankan tugas dilingkup pemerintahan, *political pressure* menjadi bagian yang melekat dan dikategorikan sebagai cara untuk menantang suatu praktek sesungguhnya (Karki, 2017). Hakikatnya, tekanan politik hanya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bukan sebagai gangguan. Dewan politik yang mewakili legislatif bisa menggunakan atau memanfaatkan posisinya dalam mendistribusikan anggaran daerah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menaikkan, menurunkan atau memotong suatu rancangan anggaran, program atau kegiatan. Strategi politik semacam ini memang bisa menguntungkan satu pihak tetapi bisa merugikan pihak yang lain. Berbagai negosiasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik akan lebih mudah meloloskan anggaran tertentu. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mendasar mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya.

D. Faktor Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari perubahan kependudukan mengenai perubahan jumlah, persebaran dan komposisi atau struktur penduduk. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perubahan pada komponen utama

pertumbuhan penduduk yaitu, fertilitas, mortalitas dan migrasi. Secara menyeluruh demografi memberi gambaran tentang perilaku penduduk, baik secara agregat maupun kelompok (Yasin & Adiotomo, 2010 : 3). dan peluang keuangan.

Faktor demografi terdiri dari usia, pendidikan dan pendapatan. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Pendidikan berpengaruh pada produktifitas dan efisiensi kerja seseorang yang kemudian akan mempengaruhi *real income* individu atau rumah tangga. *Personal income* adalah penghasilan pribadi sebelum dikurangi pajak. *Personal income* diukur berdasarkan pendapatan dari semua sumber. Komponen terbesar dari total pendapatan adalah upah dan gaji.

E. Literasi Keuangan

Literasi finansial adalah pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan agar dapat membuat keputusan yang efektif dalam konteks finansial untuk meningkatkan kesejahteraan finansial, baik individu maupun sosial, dan dapat berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat. Literasi keuangan erat kaitannya dengan manajemen keuangan dimana semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang maka makin baik pula manajemen keuangan seseorang tersebut. Manajemen keuangan pribadi merupakan salah satu aplikasi dari konsep manajemen keuangan pada level individu. Manajemen keuangan yang meliputi aktivitas perencanaan, pengelolaan dan pengendalian keuangan, sangatlah penting untuk mencapai kesejahteraan finansial. Aktivitas perencanaan meliputi kegiatan untuk merencanakan alokasi pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk apa saja.

Aktivitas perencanaan meliputi kegiatan untuk merencanakan alokasi pendapatan yang diperoleh akan digunakan untuk apa saja. Pengelolaan merupakan kegiatan untuk mengatur/mengelola keuangan secara efisien sedangkan pengendalian merupakan kegiatan untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan sudah sesuai dengan yang direncanakan/dianggarkan. Widayati (2012) mengatakan bahwa keputusan keuangan yang diambil oleh seorang individu meliputi berapa jumlah uang yang harus dikonsumsi tiap periode, apakah ada kelebihan dan bagaimana kelebihan tersebut diinvestasikan serta bagaimana mendanai investasi dan konsumsi. Lebih lanjut, Chinen dan Endo (2012) mengatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang benar tentang keuangan tidak akan memiliki masalah keuangan dimasa depan dan menunjukkan perilaku keuangan yang sehat serta mampu menentukan prioritas kebutuhan bukan keinginan.

F. Penganggaran

Penganggaran adalah cara organisasi menetapkan tujuan serta sasaran organisasi. Dalam menyusun dan menetapkan anggaran didasarkan pada rangkaian tahapan (siklus) yang dimulai pada bulan januari dan berakhir dibulan desember dalam tahun anggaran yang sedang berjalan. Untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif maka diperlukan perencanaan yang baik. Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan berikutnya (Hikmah dan Busaini, 2015). Kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini terkait dengan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya. Apabila pengelolaan keuangan daerah tidak

dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan maka akan berdampak positif pada kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut (Fitri dkk., 2017). Penyusunan rencana kerja penganggaran yang baik merupakan salah satu usaha reformasi yang dilakukan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan Negara dilakukan oleh pengguna anggaran dari tingkat bawah lembaga pemerintah, yaitu satuan kerja kemudian departemen sampai kementerian/lembaga untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparansi dan akuntabilitas sebagai untuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Rencana Kerja anggaran adalah dokumen perencanaan dan penganggaran berisi program dan kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran dilakukan dengan klasifikasi anggaran yang tepat. Pengelolaan keuangan daerah menurut Devas dkk. (1989;279) berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, yaitu 1) tanggung jawab (Accountability), 2) mampu memenuhi kewajiban keuangan, 3) kejujuran (Honesty), 4) berhasil guna (efectifity) berdaya guna (efficiency), dan 5) pengendalian. Dalam penelitiannya sari dkk. (2013) berpendapat keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah sangat ditentukan oleh kompetensi SDM dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, kompetensi SDM dan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor penting yang harus diperhatikan, agar kinerja pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat

ditingkatkan. Oleh karena itu, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun (Rahayu dkk., 2007). Pengelolaan keuangan daerah sangat bergantung pada perencanaan anggaran.

G. *Good Government Governance*

Good government governance merupakan paradigma yang baru dan berkembang di Negara kita saat ini. *good government governance* merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya saling control yang dilakukan oleh beberapa komponen yang terkait yaitu pemerintah, rakyat, ataupun usahawan yang beradap disektor swasta. Komponen yang berkaitan ini memiliki hubungan yang sama dan sederajat. Bila kesamaan derajat tersebut tidak sebanding dan tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah yang saat ini telah berpindah dari *government* ke *governance*, dengan mengutamakan kepentingan public. Beberapa kata

Fenomena *governance* mulai masuk kearena perdebatan pembangunan di Indonesia didorong oleh karna banyaknya tuntutan perubahan-perubahan baik dalam pemerintahan maupun dalam masyarakat. Pejabat diharapkan menjadi lebih transparan, efisiensi didalam penggunaan sumber daya publik, efektif dalam menjalankan tugas melayani publik, sanggup menyusun kebijakan, program dan hukum yang bisa menjamin hak asasi dan keadilan sosial (Sunarmo dkk., 2018). Fungsi legislatif untuk membangun maupun memberikan jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan untuk mendorong terciptanya wilayah yang sanggup memberikan fasilitas di komunitas dan sektor swasta untuk aktif

melakukan upaya tersebut. sesuai dengan harapan baru pada fungsi Negara tersebut, rakyat juga diharapkan agar menjadi masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya. Dalam membangun misalnya, uperan pejabat negara akan berkurang, dimana pemerintah lebih berperan untuk memfasilitasi guna mewujudkan suasana yang kondusif dalam melaksanakan proses pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Prinsip mendasar dalam konsep *good governance* yaitu, akuntabilitas, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum yang adil. Kinerja pemerintah akan lebih baik jika menerapkan prinsip *good government governance* (Wiranto dkk., 2019).

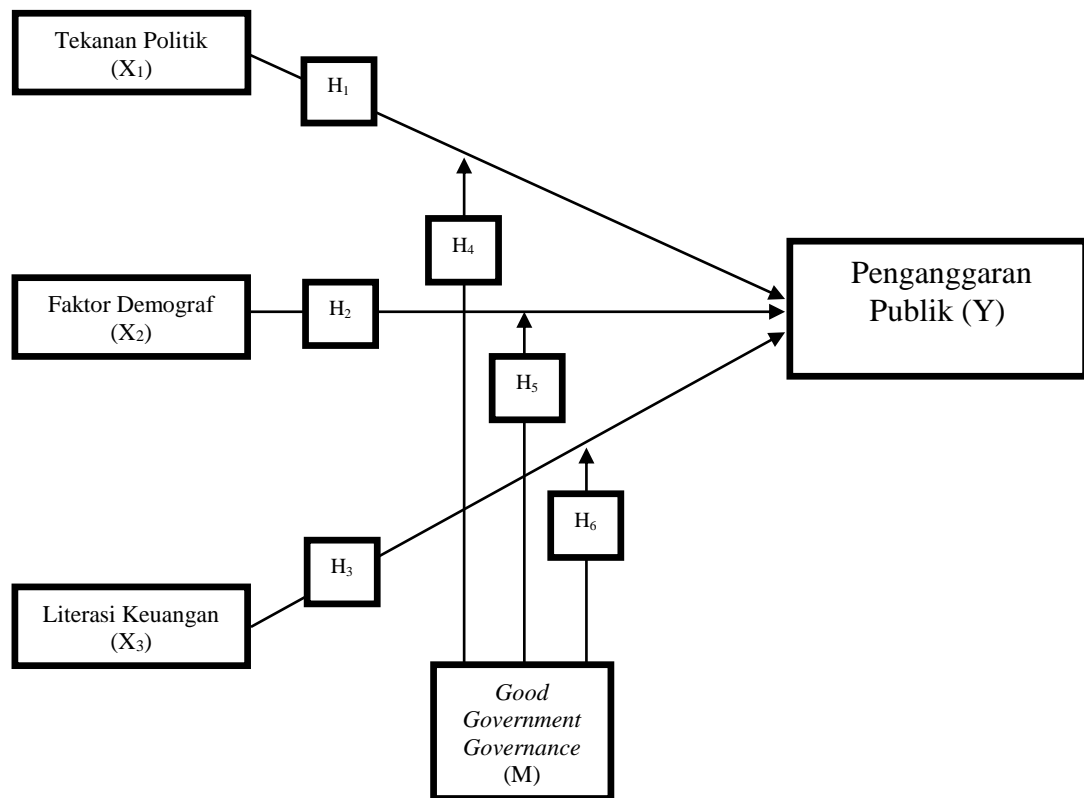
Penerapan *good governance* hadir untuk merubah yang ekstensi dalam peran Negara, dimana Negara dalam hal ini pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur setiap anggota masyarakat melalui hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Rahayuningtyas dan Setyanigrum, 2017). Pemerintahan didirikan dan memperoleh kedaulatannya melewati persetujuan rakyat yang diatur dalam perjanjian ataupun kontrak dalam bentuk konstitusi dan UUD. Secara keseluruhan, pemerintahan didirikan untuk melayani masyarakat dengan menciptakan keamanan, keadilan serta ketertiban dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam melaksanakan fungsinya, Negara memiliki alat-alat yang lengkap seperti eksekutif, yudikatif, legislatif, serta aparat keamanan dan pertahanan seperti polisi, tentara dan intelejen dan juga birokrasi dalam hal ini Pegawai negeri sipil. Selain itu, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab akan tercapai ketika penerapan tiga komponen yakni

otoritas politik, ekonomi, dan admisintrasi memiliki jaringan dan interaksi yang setara (Tulle dkk., 2018). Prinsip mendasar dalam konsep *good governance* yaitu, akuntabilitas, daya tanggap, profesionalisme, efisiensi dan efektivitas, transparansi, kesetaraan, wawasan ke depan, partisipasi dan penegakan hukum yang adil.

H. Kerangka Pikir

Riset ini memiliki tujuan untuk melihat pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan *good government governance* sebagai pemoderasi. Adapun rerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini :

Gambar 1.1



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah asosiatif. Metode asosiatif merupakan metode yang bermaksud untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan perhitungan statistika yang digunakan untuk menguji variabel (X) terhadap variabel (Y)

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Kantor Pemerintahan di Kabupaten Mamuju.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan analisis menggunakan angka statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode ini disebut sebagai metode *positivistic* karena berlandaskan pada filsafat *positivisme*. Metode ini sebagai metode ilmiah karena telah menemui kaidah-kaidah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Indriantoro dan supomo (2013: 115) mengungkapkan dalam bukunya bahwa populasi merupakan sekumpulan orang atau semua keadaan yang mempunyai karakteristik-karakteristik tertentu. Populasi dalam riset ini dilakukan kantor pemerintahan di Kabupaten Mamuju.

2. Sampel

Sampel adalah salah satu bagian dari populasi yang mewakili dari populasi yang diriset. Pengumpulan sampel dalam riset ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*, dimana sampel ditentukan dengan pertimbangan atau kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel yaitu :

- a. Sampel dipilih hanya dinas-dinas yang bergabung dalam SKPD
- b. Dinas di kabupaten Mamuju berjumlah 17 SKPD, yaitu.
 1. Dinas Sosial
 2. Dinas Pertanian dan pangan
 3. Dinas pendidikan dan Kebudayaan
 4. Dinas Kesehatan
 5. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil
 6. Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
 7. Dinas Kelautan dan Perikanan
 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
 9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 10. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Dinas perindustrian, Koperasi dan UKM
13. Dinas Komunikasi dan Informatika
14. Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan
15. Dinas Perhubungan
16. Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Energi dan Sumber Daya Mineral
17. Dinas Perpustakaan dan Arsip

c. Sampel dipilih hanya yang memiliki kaitan dengan proses penyusunan anggaran, pelaksanaannya serta bagian pertanggungjawaban. Diantaranya adalah Kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan , dan Sub Bagian Umum.

Pemilihan dinas dilakukan dengan alasan instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah yang memiliki kepentingan dalam menyusun, menggunakan dan melaporkan keuangan atau sebagai pelaksana keuangan dari pemerintah daerah yang cakupan kerjanya lebih luas daripada badan dan lembaga teknis, serta dinas merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, sehingga dianggap mampu mewakili untuk menggambarkan kemungkinan terjadinya perilaku-perilaku yang menyimpang dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Mamuju.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data subjek. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 145) data subjek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau kelompok orang yang menjadi subyek penelitian (responden).

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2013 : 142) data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung tanpa melalui perantara media. Data primer dalam penelitian ini merupakan tanggapan yang dijawab secara langsung melalui kusioner.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini fakta yang dingkapkan adalah fakta actual, dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner yang berisi pernyataan yang telah dirumuskan sebelumnya. Sugiyono (2014: 142) dalam bukunya mengungkapkan bahwa koesioner adalah beberapa pernyataan yang tertulis untuk digunakan menggali informasi dari responden tentang pribadinya atau hal-hal yang mungkin ia ketahui. Dalam mendapatkan data yang sesungguhnya, koesioner dibagikan secara langsung pada responden dengan mendatangi tempat responden bekerja dalam hal ini Kantor Pemerintahan Mamuju.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan variabel yang sedang diteliti (Sugiyono, 2014: 92). Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Adapun kuesioner untuk mengukur variabel Tekanan Politik (X1), Faktor Demografi (X2), Literasi Keuangan (X3), *Good Government Governance* (M), dan *Penganggaran Publik* (Y). untuk mengukur pendapat dari responden maka digunakan teknik skala *likert* untuk mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak terhadap subjek atau objek dalam kejadian tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2013: 104).

G. Metode Analisis Data

Teknik analisa data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data dari seluruh responden terkumpul. Untuk penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis dengan bantuan computer melalui program SPSS 21.

1. Statistik Deskriptif

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dalam bentuk skala pengukuran. Untuk penelitian ini skala pengukuran yang dipakai adalah skala *likert*. Analisis data kuantitatif dari responden diberi jawaban dengan skor sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1.	Sangat tidak setuju	1
2.	Tidak setuju	2

3.	Ragu-ragu	3
4.	Setuju	4
5.	Sangat setuju	5

Sumber: Sugiyono, 2012

Data jawaban kemudian akan menghasilkan data ordinal. Data tersebut yang berupa skala *likert* akan dianalisis berdasarkan metode analisis data yang sesuai untuk dipakai dalam penelitian ini.

2. Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas di gunakan untuk melihat kualitas koesoner yang dipakai dalam penelitian ini, apakah koesoner yang digunakan tersebut valid. Kuesioner bisa dikatakan valid bila pernyataan dalam koesoner sanggup mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh koesoner tersebut (Ghozali, 2012: 52). Kriteria pengujian validitas sebagai berikut:

- 1) bila r hitung positive dan r hitung $> r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah valid
- 2) bila r hitung negative dan r hitung $< r$ tabel maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid.

b. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur koesoner yang merupakan indikator dari variabel. Koesoner di katakana handal bila jawaban responden adalah konsisten atau stabill dari waktu ke waktu. Koesoner dikatakan layak atau reliabel bila nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,06, sebaliknya tidak reliabel bila *cronbach alpha* lebih kecil dari 0,06 (Ghozali, 2012: 47).

3. Uji Hipotesis

a. Analisis Regresi Linear Berganda

dalam pengujian hipotesis terhadap pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan analisa regresi lineare berganda. Sugiyono (2010: 277) mengungkapkan dalam bukunya bahwa analisa regresi berganda merupakan analisis yang digunakan dalam meneliti untuk meramalkan keadaan naik turunnya suatu variabel dependen, jika dua atau lebih variabel independen menjadi faktor predictor dimanipulasi.

Rumus yang digunakan untuk pengujian variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penganggaran Publik

α = Konstanta

X1 = Tekanan Politik

X2 = Faktor Demografi

X3 = Literasi Keuangan

β_1 = koefisien regresi Tekanan Politik

β_2 = koefisien regresi Faktor Demografi

β_3 = koefisien regresi Literasi Keuangan

e = *error term*

b. *Moderated Regression Analysis (MRA)*

Untuk menguji variabel moderating, maka digunakan uji interaksi. Uji interaksi atau sering disebut dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresi mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Bentuk persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 |X_1 - X_4| + \beta_6 |X_2 - X_4| + \beta_7 |X_3 - X_4| + e$$

Keterangan :

Y = Penganggaran Publik

α = Konstanta

X1 = Tekanan Politik

X2 = Faktor Demografi

X3 = Literasi Keuangan

X4 = *Good Government Governance*

$|X_1 - X_4| - |X_3 - X_4|$ = interaksi antara Tekanan Politik, Faktor Demografi, Literasi Keuangan dengan *Good Government Governance*.

B₁- β_4 = Koefisien regresi Dividen

B₅- β_7 = Koefisien regresi Moderasi

e = *error term*

Tabel 3.2
Tabel Penentu Moderasi

No	Tipe Moderasi	Koefisiensi
1	<i>Pure</i> Moderasi	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Signifikan
2	<i>Quasi</i> moderasi	b ₂ Signifikan b ₃ Signifikan
3	<i>Homologiser</i> Moderasi (Bukan Moderasi)	b ₂ Tidak Signifikan b ₃ Tidak Signifikan
4	Prediktor	b ₂ Signifikan b ₃ Tidak Signifikan

Sumber: Atmaja dkk., 2017

Keterangan :

b₂ : Good Government Governance

b₃ : Variabel interaksi antara masing-masing variabel bebas (Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan) dengan variabel Good Government Governance.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Mamuju

Daerah Kabupaten Mamuju, merupakan salah satu kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi dalam Wilayah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, Mamuju sampai saat ini, Mamuju yang dipimpin oleh seorang bupati ibukota Provinsi Sulawesi Barat yang menyimpan sejuta khazanah. Dimulai dari letaknya yang sangat strategis, wilayahnya yang luas hingga kekayaan alamnya yang melimpah. Mamuju menjadi ibu kota provinsi yang secara administratif terbagi menjadi 5 kabupaten yaitu Kabupaten Polewali Mandar, Mamasa, Majene, Mamuju, dan Mamuju Utara.

Penetapan Hari Jadi Mamuju sebagai salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan memakan waktu yang cukup panjang dan melibatkan banyak tokoh di daerah ini, Kajian sejarah dan berbagai peristiwa penting melahirkan beberapa versi mengenai waktu yang paling tepat untuk dijadikan sebagai Hari Jadi Mamuju. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju hasil pemilu 1999 menerima Ranperda dan setelah melalui pembahasan termasuk dengar pendapat dengan para tokoh sejarah, budayawan dan tokoh intelektual di daerah ini, dalam sidang paripurna tanggal 9 Agustus 1999 secara resmi Ranperda tentang Hari Jadi Mamuju disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju. Peraturan daerah ini adalah Perda Nomor 05 Tahun 1999 diundangkan pada Tanggal 10 Agustus 1999 dan dicantumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 1999

Nomor 14. Inti dari Perda tersebut adalah menetapkan ***TANGGAL 14 JULI 1540 SEBAGAI HARI JADI MAMUJU***. Apabila dilihat dari sudut yuridis formal, maka Hari Jadi Mamuju akan jatuh pada tanggal 4 Juli 1959, yaitu saat ditetapkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi.

Tabel 4.1
Bupati kabupaten Mamuju tahun 1960 sampai sekarang

No	Nama Bupati	Periode
1.	Andi Paccoba Amrullah	1960 – 1964
2.	Abdul Madjid Pattaropura	1964 - 1965
3.	Abdul Wahab Azasi	1965 – 1969
4.	H. Hapati Hasan, B.A	1969 – 1979
5.	Atik Soetedja	1979 – 1984
6.	Musa Karim	1984 – 1989
7.	Brigjen. H. Djruritno	1989 – 1994
8.	H. Nurhaida Purnomo	1994 – 1999
9.	H. Almalik Pabari	1999 – 2004
10.	Drs. H. Suhardi Duka, M.M.	2004 – 2015
11.	Drs. H. Habsi Wahid, M.M.	2016– Sekarang

2. Letak Wilayah dan Geografis

Secara geografi Kota Mamuju berada ditepi barat Pulau Sulawesi. Di utara terdapat Teluk Mamuju dan di selatan ada Teluk Lebani. Topografi wilayah Kota Mamuju berupa pesisir hingga Pegunungan. Ketinggian wilayah Kota Mamuju antara 0 sampai >1500 meter di atas permukaan air laut (Mdlp) dengan titik tertinggi berada di Gunung Adang Batambalo. Sungai-sungai besar yang ada di Kota Mamuju diantaranya Sungai Mamuju, Sungai Karema, Sungai Simboro, Sungai Anung, Sungai Taparua, Sungai Anusu, Sungai Tampala dan Sungai Malunda. Secara geologi, wilayah Kota Mamasa tersusun oleh batuan Formasi Gunung Api Adang berupa tuf lapili, breksi bersisipan lava, batupasir dan batu

lempung. Sedangkan wilayah lembah yang dialiri Sungai Taparia serta Sungai Karema terusun atas Formasi Mamuju berupa Napal, kalkerenit dan batugamping koral bersisipkan tuf dan batupasir. Kota Mamuju yang beriklim tropis dengan dua musim dalam satu tahunnya yaitu musim kemarau dan penghujan, dengan suhu udara pada siang hari berkisar antara 24 - 34 derajat Celcius.

3. Slogan Kabupaten Mamuju

Adapun lambang dari slogan kabupaten Mamuju :



a. Nama Lambang

Sebagaimana dengan daerah lainnya, Kabupaten Mamuju juga mempunyai lambang daerah yang disebut " MANAKARRA " yang berarti " Pusaka yang sakti atau petunjuk "

b. Bentuk Lambang

Bentuk lambang daerah Mamuju berupa - enam perisai, melambangkan ketangkasan dan sifat kepahlawanan.

c. Lukisan Dasar

Enam buah tali berpilin membatasi bidang - melambangkan persatuan yang kokoh bagi enam buah kecamatan daerah Kabupaten Mamuju (sekarang pemekaran daerah menjadi 16 kecamatan). Enam mata rantai - melambangkan ikatan yang kokoh, kuat bagi suku-suku bangsa yang bersabar mendiami daerah Mamuju. Bintang ini melambangkan bahwa penduduk daerah ini senantiasa menjunjung tinggi ketuhanan yang maha esa.

d. Lukisan Inti

Setangkai butir padi yang berbiji empat puluh lima dan setangkai kapas yang berbiji delapan, melambangkan cita kemakmuran berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945. Pita merah putih yang di atasnya dibalik aksara Manakarra, menggambarkan bahwa daerah Mamuju yang juga daerah Manakarra adalah bagian dari Negara Republik Indonesia di Proklamasikan pada 17 Agustus 1945 yang mengkeramatkan Sang Saka Merah Putih.

Sebuah tembok yang kokoh, kuat tersusun bertingkat enam pada tengah dasarnya terdapat sebuah roda yang melambangkan gerak pembangunan yang menyeluruh dan berencana yang dilaksanakan tahap demi tahap oleh tenaga manusia menuju kepada pengelolaan secara mekanisasi yang titik tolaknya diinspirasi oleh hari 1 Juli 1966 sebagai Hari Kebangkitan Mamuju yang dijiwai oleh makna yang terkandung di dalam Pancasila. Pada latar belakang lukisan-lukisan menggambarkan daerah Mamuju yang indah, subur terdiri dari gunung-gunung yang ditumbuhi hutan yang lebat dan daerah yang luas, dapat dijadikan sawah dan tanah perkebunan. Sedang perahu-perahu yang berlayar melambangkan

alat perhubungan tradisional antara daerah dan pulau yang dipergunakan di daerah ini.

Lukisan gunung Sandapang yang berpuncak tinggi, di atasnya senantiasa dihiasi dengan awan yang putih melambangkan alam daerah Mamuju secara khusus dan sebagai cucuran dari cita-cita peningkatan daya juang setinggi mungkin oleh penduduk dalam rangka melaksanakan masyarakat adil dan makmur. Sedang awan yang putih tersedia untuk tempat mencatatkan nama bagi orang yang ingin turut memberikan dharma bhaktinya menuju cita-cita keadilan dan kemakmuran bagi segenap penduduk.

e. Rumusan Arti

Mamuju dengan segala yang ada padanya berusaha membangun dan mengelola kekayaan alamnya setinggi mungkin untuk memperoleh kemakmuran yang merata bagi setiap penduduk sebagai realisasi dari masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

f. Kesimpulan

Segala cita dan makna yang terkandung dalam lambang ini, dituangkan dalam nama "MANAKARRA", inilah warisan dan petaruh nenek moyang yang diwariskan sejak dahulu kala yang menjadi tanggung jawab bagi angkatan yang datang kemudian, untuk membawa daerah ini di tingkat kemakmuran dan kejayaan.

4. Visi dan Misi

Visi

Gerakan membangun Mamuju, Menuju Kabupaten Mamuju yang maju dan mandiri.

Misi

- a. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
- b. Pembangunan Ekonomi (Ekonomi maju berbasis pertanian)
- c. Pembangunan Pemerintahan yang Bersih dan Baik
- d. Pemantapan Ibu Kota dan Penataan Wilayah
- e. Kepastian Hukum dan Rasa Aman

B. Hasil Penelitian

1. Karakteristik Responden

Kuesioner yang dibagikan berjumlah 68 orang dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Data Distribusi Kuesioner

NO	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Kuesioner yang disebar	68	100%
2	Kuesioner yang tidak kembali	-	-
3	Kuesioner yang kembali	68	100%
4	Kuesioner yang cacat	-	-
5	Kuesioner yang diolah	68	100%
N/sampel = 68			
Responden Rate 100%			

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa kuesioner yang disebar berjumlah 68 butir dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 68 butir dan dapat diolah adalah sebanyak 68 butir atau tingkat pengembalian yang diperoleh adalah 100% dari total yang disebar.

Terdapat 4 karakteristik responden yang dimasukkan dalam penelitian ini, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan masa kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karakteristik responden tersebut akan dijelaskan lebih lanjut pada tabel mengenai data responden sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

a. **Tabel 4.3**
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	25	36,76%
2	Laki-Laki	43	63,23%
Jumlah		68	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel (4.3) menunjukkan bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden laki-laki sebanyak 43 orang atau sebesar 63,23% sedangkan sisanya yaitu sebanyak 25 wanita atau sebesar 36,76%. Hal ini menunjukkan bahwa SKPD di kota Mamuju didominasi oleh pegawai laki-laki. Banyaknya pegawai laki-laki dibandingkan dengan perempuan bukan berarti tanggungjawab perempuan tidak ada lagi. Dari pemahaman ini dapat diketahui bahwa tanggungjawab perempuan tidak lagi dibedakan dengan tanggung jawab perempuan. Perbedaan jenis kelamin kini tak hanya dipandang sebagai perbedaan secara biologis.

2. Usia

Tabel 4.4
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1	20-30	2	2,94%
2	31-40	22	32,35%
3	41-50	25	36,76%

4	>50	19	27,94 %
Jumlah		68	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa usia responden dalam penelitian ini yang berpartisipasi dalam penganggaran publik di SKPD kota Mamuju di dominasi oleh usia antara 41-50 tahun sebanyak 25 orang. Hal ini disebabkan karena usia tersebut merupakan usia produktif seorang pegawai dimana umur-umur tersebut merupakan puncak karir seorang pegawai.

3. Tingkat Pendidikan

Tabel 4.5
Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	D-3	3	4,41%
2	S-1	48	70,58%
3	S-2	20	29,41%
4	S-3	1	1,47%
Jumlah		68	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tingkat pendidikan seringkali dikaitkan dengan masalah etika. Persoalan etika pada tingkat pendidikan yang semakin tinggi cenderung menghasilkan etika yang semakin baik pula. Hasil olah data untuk pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden yang ada pada SKPD kota Mamuju paling banyak berada pada strata S1 sebanyak 48 responden. Hal ini dikarenakan bahwa tingkat pendidikan sejalan dengan pemahaman etika pegawai, kemampuan menelaah norma-norma etis masyarakat khususnya ditempat kerja menjadi hal yang utama.

4. Masa Kerja

b. **Tabel 4.6**
Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Jumlah	Persentase
1	0-10	14	20,58%
2	10-20	32	47,05%
3	>20	22	32,35%
Jumlah		68	100%

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Kemampuan pegawai dengan masa kerja yang paling lebih lama mampu menguraikan pekerjaan, dimana pegawai tersebut lebih paham tugas atau pekerjaan mana yang lebih diutamakan. Hal sebaliknya terjadi pada pegawai dengan masa kerja yang terbilang baru, para pegawai pada tingkat ini masih mengalami kesulitan dalam mengelola sejauh mana tugas dikerjakan. Tabel 4.6 menunjukkan tingkat lama bekerja responden yang paling banyak berada pada tahun 10-20 tahun yaitu sebanyak 32 responden atau sebesar 47,05%. Hal ini berarti bahwa semakin lama seseorang bekerja, pegawai semakin cenderung mengalami peningkatan dalam hal kinerjanya

2. Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Variabel

Deskripsi Variabel dari 68 responden dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 4.7
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Tekanan Politik	68	14,00	30,00	23,5441	3,13590
Faktor Demografi	68	15,00	30,00	24,5294	3,14558
Literasi Keuangan	68	12,00	25,00	22,0147	2,40331

Good Government Governance	68	20,00	30,00	26,0882	2,53769
Penganggaran Publik	68	16,00	30,00	25,3971	2,73256
Valid N (listwise)	68				

Sumber : Output SPSS 21 (2020)

Tabel 4.7 menunjukkan statistic deskriptif dari masing-masing variabel penelitian. Menunjukkan nilai N atau jumlah data 68 sampel. Variabel Tekanan Politik menunjukkan nilai minimum sebesar 14, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 23,54 dengan standar deviasinya sebesar 3,135. Sedangkan Variabel Faktor Demografi menunjukkan nilai minimum sebesar 15, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 24,52 adapun standar deviasinya sebesar 3,145. Sedangkan Variabel Literasi Keuangan menunjukkan nilai minimum sebesar 12, nilai maksimum sebesar 25, mean (rata-rata) sebesar 22,01, adapun standar deviasinya sebesar 2,403. Sedangkan Variabel penganggaran publik menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 25,39, adapun standar deviasinya sebesar 2,732. Sedangkan Variabel *good government governance* menunjukkan nilai minimum sebesar 20, nilai maksimum sebesar 30, mean (rata-rata) sebesar 26,08, adapun standar deviasinya sebesar 2,537.

b. Analisis Deskriptif Pernyataan

Varibel yang diteliti dalam penelitian ini adalah Tekanan Politik, Faktor Demografi Literasi Keuangan, *good government governance* dan Penganggran Publik.

1) Analisis Deskriptif Variabel Tekanan Politik (X₁)

Analisis deskriptif terhadap variabel Tekanan Politik terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Tekanan Politik. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.8
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Tekanan Politik

Item Pernyataan	Frekuensi dan Presentase					Skor	Mean
	STS	ST	N	S	SS		
X1.1		3	8	42	15	273	4,01
X1.2		6	7	37	18	271	3,98
X1.3		6	19	27	16	257	3,77
X1.4		1	9	38	20	281	4,13
X1.5		9	4	43	12	262	3,85
X1.6	1	5	9	46	7	257	3,77
Rata-Rata Keseluruhan							3,91

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 68 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Tekana Politik (X₁) berada pada skor 3,91. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel Tekanan Politik. Pada variabel Tekanan Politik, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,13 berada pada item pertanyaan keempat. Responden penelitian ini terdiri dari kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Keuangan dan Perencanaan, Sub bagian Umum sebagai partisipan dalam proses penganggaran sebagian besar berpendapat bahwa Tekanan politik tidak berdampak baik pada proses penganggaran publik, dengan adanya tekanan politik maka anggaran yang dihasilkan akan jauh unsure-unsur keadilan.

2) Analisis Deskriptif Variabel Faktor Demografi (X₂)

Analisis deskriptif terhadap variabel Faktor Demografi terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Faktor Demografi. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.9
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Faktor Demografi

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X2.1			8	40	20	284	4,17
X2.2		2	5	36	25	288	4,23
X2.3		2	7	30	29	290	4,26
X2.4		3	7	31	27	286	4,20
X2.5		5	15	31	17	264	3,88
X2.6	1	7	15	29	16	256	3,76
Rata-Rata Keseluruhan							4,08

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa dari 68 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Faktor Demografi (X₂) berada pada skor 4,08. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel. Pada variabel Faktor Demografi, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,26 berada pada item pertanyaan ketiga. Responden penelitian ini terdiri dari kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Keuangan dan Perencanaan, Sub bagian Umum sebagai partisipan dalam proses penganggaran sebagian besar berpendapat bahwa Faktor Demografi Semakin lama seseorang dalam bekerja, maka semakin membuat seseorang tersebut mampu memahami tentang penganggaran.

3) Analisis Deskriptif Variabel Literasi Keuangan (X₃)

Analisis deskriptif terhadap variabel Literasi Keuangan terdiri dari 5 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Literasi Keuangan. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.10
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Literasi Keuangan

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
X3.1			5	39	21	290	4,26
X3.2			2	29	34	304	4,47
X3.3		1	4	40	20	286	4,20
X3.4		1	3	20	41	311	4,57
X3.5		1	2	26	36	306	4,50
Rata-Rata Keseluruhan							4,40

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat diketahui bahwa dari 68 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Literasi Keuangan (X₃) berada pada skor 4,40. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel . Pada variabel Literasi Keuangan, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,57 berada pada item pertanyaan keempat. Responden penelitian ini terdiri dari kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Keuangan dan Perencanaan, Sub bagian Umum sebagai partisipan dalam proses penganggaran sebagian besar berpendapat bahwa seseorang harus memiliki Kemampuan dalam perencanaan penganggaran yang baik, yang dimana sangat diperlukan dalam penganggaran publik.

4) Analisis Deskriptif Variabel *Good Government Governance* (M)

Analisis deskriptif terhadap variabel *Good Government Governance* terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai *Good Government Governance*. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.11
Deskripsi Item Pernyataan Variabel *Good Government Governance*

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Skor	Mean
	STS	TS	N	S	SS		
M1	1	1	4	37	22	280	4,11
M2		1	3	25	36	307	4,51
M3		1	3	28	33	290	4,26
M4			6	25	34	291	4,27
M5		3	9	42	11	310	4,55
M6		3	7	38	16	296	4,35
Rata-Rata Keseluruhan							4,34

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa dari 68 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada *good government governance* (M) berada pada skor 4,34. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel *good government governance*. Pada variabel *good government governance*, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,55 berada pada item pertanyaan kelima. Responden penelitian ini terdiri dari kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Keuangan dan Perencanaan, Sub bagian Umum sebagai partisipan dalam proses penganggaran sebagian besar berpendapat bahwa dalam penganggaran bahwa Pertanggungjawaban dalam pengelolaan

keuangan dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan disampaikan tepat pada waktunya.

5) Analisis Deskriptif Variabel Penganggaran Publik (Y)

Analisis deskriptif terhadap variabel Penganggaran Publik terdiri dari 6 item pernyataan akan dilakukan dari hasil pernyataan responden mengenai Penganggaran Publik. Nilai rata-rata hasil pernyataan responden dapat dilihat hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.12
Deskripsi Item Pernyataan Variabel Penganggaran publik

Item Pernyataan	Frekuensi dan Persentase					Total	Rata- Rata
	STS	TS	N	S	SS		
Y1		1	5	40	22	287	4,22
Y2			4	27	37	305	4,48
Y3		1	3	31	33	300	4,41
Y4			7	27	34	299	4,39
Y5		3	9	46	10	267	3,92
Y6		6	7	39	16	269	3,95
Rata-Rata Keseluruhan							4,22

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa dari 68 orang responden yang diteliti, secara umum persepsi responden terhadap item-item pernyataan pada Penganggaran Publik (Y) berada pada skor 4,22. Hal ini berarti bahwa rata-rata responden menjawab setuju pada variabel Penganggaran Publik. Pada variabel Penganggaran Publik, terlihat bahwa nilai indeks tertinggi sebesar 4,48 berada pada item pertanyaan kedua. Responden penelitian ini terdiri dari kepala SKPD, Sekertaris SKPD, Sub Keuangan dan Perencanaan, Sub bagian Umum sebagai partisipan dalam Penganggaran Publik sebagian besar berpendapat bahwa dalam

menyusun anggaran segala proses dan tahapan penyusunan harus memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pencapaian prestasi kerja.

C. Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Uji validitas data adalah prosedur untuk memastikan apakah kuesioner yang akan dipakai untuk mengatur variabel penelitian valid atau tidak. Kuesioner dapat dikatakan valid jika pernyataan pada koesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk mengetahui item pernyataan itu valid dengan menilai *corrected item total correlation*. Apabila item pernyataan mempunyai r hitung $>$ dari r tabel maka dapat dikatakan valid. Pada penelitian ini terdapat jumlah sampel (n) = 68 responden dan besarnya df dapat dihitung $68-2 = 66$ dengan $df = 66$ dan $\alpha = 0,05$ maka di dapat r tabel = 0,2387. Jadi item pernyataan yang valid mempunyai r hitung lebih besar dari 0,2387.

Adapun hasil uji validitas data dalam penelitian ini dapat dilihat pada

Tabel berikut:

Tabel 4.13
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r hitung	r tabel	Keterangan
Tekanan Politik	X1.1	0,471	0,2387	Valid
	X1.2	0,610	0,2387	Valid
	X1.3	0,732	0,2387	Valid
	X1.4	0,574	0,2387	Valid
	X1.5	0,737	0,2387	Valid
	X1.6	0,725	0,2387	Valid

Faktor Demografi	X2.1	0,524	0,2387	Valid
	X2.2	0,634	0,2387	Valid
	X2.3	0,741	0,2387	Valid
	X2.4	0,743	0,2387	Valid
	X2.5	0,637	0,2387	Valid
	X2.6	0,661	0,2387	Valid
Literasi Keuangan	X3.1	0,735	0,2387	Valid
	X3.2	0,717	0,2387	Valid
	X3.3	0,840	0,2387	Valid
	X3.4	0,831	0,2387	Valid
	X3.5	0,807	0,2387	Valid
Penganggaran publik	Y.1	0,782	0,2387	Valid
	Y.2	0,688	0,2387	Valid
	Y.3	0,686	0,2387	Valid
	Y.4	0,734	0,2387	Valid
	Y.5	0,460	0,2387	Valid
	Y.6	0,667	0,2387	Valid
<i>Good Government Governance</i>	M.1	0,460	0,2387	Valid
	M.2	0,735	0,2387	Valid
	M.3	0,692	0,2387	Valid
	M.4	0,693	0,2387	Valid
	M.5	0,712	0,2387	Valid
	M.6	0,766	0,2387	Valid

Sumber : Sumber data primer yang diolah (2020)

Dari tabel 4.13 tersebut menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan memiliki nilai koefisien korelasi positif dan lebih besar dari r-tabel hal ini berarti bahwa data yang diperoleh telah valid dan dapat dilakukan pengujian data lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan tersebut adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu yang telah diberikan. Uji reliabilitas data dilakukan dengan metode *Alpha Cronbach* yakni suatu instrumen dikatakan *reliable* jika memiliki koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih. Hasil pengujian reliabilitas data dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.14
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach' Alpha	Keterangan
1	Tekanan Politik	0,720	Reliable
2	Faktor Demografi	0,733	Reliable
3	Literasi Keuangan	0,846	Reliable
4	Penganggaran Publik	0,747	Reliable
5	<i>Good Government Governance</i>	0,740	Reliable

Sumber : Data primer yang diolah (2020)

Tabel 4.14 menunjukkan nilai *cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen dari kuesioner yang digunakan untuk menjelaskan variabel Tekanan Politik, Faktor Demografi, Literasi keuangan, Penganggaran Publik, dan *good government governance* yaitu dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel.

D. Analisis Data

1. Uji Hipotesis

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis H_1 , H_2 , dan H_3 menggunakan analisis regresi berganda dengan meregresikan variabel independen (Tekanan Politik, Faktor Demografi, Literasi Keuangan) terhadap variabel dependen (Penganggaran Publik), sedangkan untuk menguji hipotesis H_4 , H_5 , dan H_6 menggunakan analisis moderasi dengan pendekatan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA). Uji hipotesis ini dibantu dengan menggunakan program SPSS versi 21.

a. Hasil Uji Regresi Berganda Hipotesis H_1 , H_2 , H_3

Pengujian hipotesis H_1 , H_2 dan H_3 dilakukan dengan analisis regresi berganda. Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.15
Uji Koefisien Determinan R
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std Erros of the Estimate
1	.724 ^a	.524	.502	1,92904

a. Predictors: (Constant), Tekanan Politik, Faktor Demografi, Literasi Keuangan

Sumber: Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, nilai R^2 (*Adjusted R Square*) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai R^2 sebesar 0,502, hal ini berarti bahwa 50,2% yang menunjukkan bahwa proses penyusunan anggaran publik dipengaruhi oleh variabel Tekanan Politik, Faktor Demografi, Literasi Keuangan.

Sisanya sebesar 40,8% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.16
Hasil Uji F-Uji Simultan
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1					
Regression	262,122	3	87,374	23,480	.000 ^b
Residual	238,158	64	3,721		
Total	500,279	67			

a. Dependent Variabel : Penganggaran Publik

b. Predictors : (Constant), Literasi Keuangan, Tekanan Politik, Faktor Demografi

Sumber : Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.16 dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 23,480 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, dimana nilai F hitung (21,650) lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 2,75 ($df_1=4-1=3$ dan $df_2=68-4=64$). Berarti variabel Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Penganggaran Publik.

Tabel 4.17
Hasil Uji T Hitung
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.305	2.809		.821	.415
Tekanan politik	.361	.080	.414	4.514	.000
Faktor Demografi	.201	.080	.231	2.507	.015

Literasi	.439	.101	.386	4.363	.000
Keuangan					

a Dependent Variabel : Penganggaran Publik

Sumber : Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut

$$Y = 2,305 + 0.361 X_1 + 0.201X_2 + 0.439X_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Penganggaran Publik
X1	= Tekanan Politik
X2	= Faktor Demografi
X3	= Literasi Keuangan
a	= Konstantan
b1,b2,b3	= Koefisien Regresi
e	= Standar <i>Error</i>

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Nilai Konstanta sebesar 2.305 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan) adalah nol maka Penganggaran Publik akan terjadi sebesar 2.305.
2. Koefisien regresi variabel Tekanan Politik (X1) sebesar 0.361 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel Tekanan Politik terhadap penganggaran publik akan memperbesar pencapaian ketepatan anggaran sebesar 0.136.
3. Koefisien regresi variabel Faktor Demografi (X2) sebesar 0.201 mengindikasikan bahwa setiap satu satuan variabel Faktor Demografi terhadap penganggaran publik meningkatkan perilaku seseorang dalam mengelola penganggaran sebesar 0.201.

4. Koefisien regresi variabel Literasi Keuangan (X3) sebesar 0.439 mengindikasikan bahwa setiap satu satuan variabel Literasi Keuangan terhadap Penganggaran publik meningkatkan pengetahuan keuangan bagi penganggaran sebesar 0.439.

Hasil interpretasi atas hipotesis penelitian (H_1 , H_2 dan H_3) yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) Tekanan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penganggaran Publik (H_1)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel Tekanan Politik memiliki t hitung sebesar $4.514 < t$ tabel sebesar 1,9965 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_1 diterima. Hal ini berarti Tekanan Politik berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penganggaran publik. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan Tekanan Politik berpengaruh positif terhadap penganggaran publik terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya perilaku Tekanan Politik pada saat proses penganggaran Publik cenderung akan memperbesar pencapaian ketepatan anggaran sebesar 0,136.

- 2) Faktor Demografi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penganggaran publik (H_2)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel Faktor Demografi memiliki t hitung sebesar $2.507 < t$ tabel sebesar 1,9965 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,015 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_2 diterima. Hal ini berarti Faktor Demografi berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penganggaran publik. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan Faktor Demografi berpengaruh positif terhadap penganggaran publik terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan

dengan adanya Faktor Demografi pada saat proses penganggaran Publik cenderung akan meningkatkan perilaku seseorang dalam mengelola penganggaran sebesar 0.201.

- 3) Literasi Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penganggaran publik (X3)

Berdasarkan tabel 4.17 dapat dilihat bahwa variabel Faktor Demografi memiliki t hitung sebesar $4.363 < t$ tabel sebesar 1,9965 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05, maka H_3 diterima. Hal ini berarti Literasi Keuangan berpengaruh Positif dan signifikan terhadap penganggaran publik. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan Literasi Keuangan berpengaruh positif terhadap penganggaran publik terbukti. Hasil penelitian ini menunjukkan dengan adanya Literasi Keuangan pada saat proses penganggaran Publik cenderung akan meningkatkan pengetahuan keuangan bagi penganggaran sebesar 0.439.

b. Hasil Uji Regresi Moderating dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* terhadap Hipotesis Penelitian H_4 , H_5 , dan H_6

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 mempunyai interval 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

Tabel 4.18
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	std. Error of the Estimate
1	.759 ^a	.577	.527	187.899

a. Predictors (Constant), X3_M, Tekanan Politik, Faktor Demografi, *Good Government Governance*, X1_M, Literasi Keuangan, X2_M
 Sumber : Output SPSS 21 (2020)

Berdasarkan tabel 4.18 di atas menunjukkan nilai *Adjusted R Square* yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel moderasi dalam menjelaskan variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen) atau seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang didukung dengan variabel moderasi. Pada tabel tersebut nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.527. Hal ini berarti bahwa sebesar 52,7% penganggaran publik dipengaruhi oleh Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan yang dimoderasi oleh *Good Government Governance*. Sisanya 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum dimasukkan dalam penelitian.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji Simultan dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui perbandingan nilai F tabel dan Perbandingan *Probability value*. Pengujian simultan menggunakan metode perbandingan *Probability value*. Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha=0.05$.

Tabel 4.19
Hasil Uji F- Uji Simultan

Anova

Modal	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
1 Regression	288,444	7	41,206	11,671	.000 ^b
Residual	211,836	60	3,531		
Total	500,279	67			

a.Dependent Variabel: Penganggaran Publik

b.Predictors: (constant), X3_M, Tekanan Politik, Faktor Demografi, Good Government Governance, X1_M, Literasi Keuangan, X2_M.

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas dapat dilihat bahwa dalam pengujian regresi moderasi menunjukkan hasil F hitung sebesar 11,671 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih dari 0,05. Perolehan tingkat signifikansi tersebut lebih kecil dari 5% ($\alpha=0,05$) dan nilai F-hitung sebesar 11,671, lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,138. Hal ini berarti bahwa variabel Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi keuangan secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas.

3. Uji Parsial (Uji t)

Pada penelitian ini digunakan parsial (t) berdasarkan perbandingan nilai probabilitas dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak
- (2) Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima
- (3) Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah positif (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

4.20
Hasil Uji Parsial Regresi Moderasi
Coefficients

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	53,582	38,765		1,382	.172
Tekanan Politik	.586	.905	.672	.647	.520
Faktor Demografi	.773	.910	.890	.850	.399
Literasi Keuangan	-2,545	1,424	-2,238	-1,786	.079
Good Government Governance	-1,979	1,495	-1,838	-1,324	.191
X1_M	-,009	.035	-,345	-,270	.788
X2_M	-,020	.035	-,812	-,572	.569
X3_M	.114	.055	3,182	2,071	.043

a. Dependent variable: penganggaran publik
 sumber : *Output SPSS 21 (2020)*

berdasarkan tabel 4.20 dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 53,582 + 0,586X_1 + 0,773X_2 - 2,545X_3 - 1,979ZM - 0,009 [ZX_1 - ZM] - 0,020 [ZM_2 - ZM] + 0,114 [ZM_3 - ZM]$$

Keterangan:

Y = Penganggaran Publik
 ZX₁ = Tekanan Politik
 ZX₂ = Faktor Demografi
 ZX₃ = Literasi Keuangan
 ZM = *Good Government Governance*
 ZX₁ – ZM = Interaksi diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX₁ – ZM

Dari hasil Uji *Moerated Regression Analysis (MRA)* bisa kita lihat pada tabel 4.20 yang dimana persamaan antara variabel X terhadap Y yang di moderasi yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Tekanan politik (X1) terhadap Penganggaran Publik (Y) yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* (M), menunjukkan persamaan

$$Y_1 = 53,582 + 0,586^{b1}_{X1} - 1,979^{b2}_M - 0,009^{b3}_{M \times X2}$$

Berdasarkan persamaan diatas dan tabel hasil output SPSS menunjukkan bahwa $b_2 = 0,191$ dan $b_3 = 0,788$. Hasil tersebut dibandingkan dengan tabel 3.2, tabel penentu moderasi yang menunjukkan bahwa *Good Government Governance* merupakan **Homologiser**. Hasil hubungan antara Tekanan politik dengan Penganggaran Publik pada SKPD kabupaten Mamuju, hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa H4 di tolak.

2. Variabel Faktor Demografi (X2) terhadap Penganggaran Publik (Y) yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* (M), menunjukkan persamaan.

$$Y_2 = 53,582 + 0,773^{b1}_{X2} - 1,979^{b2}_M - 0,202^{b3}_{M \times X2}$$

Berdasarkan persamaan diatas dan tabel hasil output SPSS menunjukkan bahwa $b_2 = 0,191$ dan $b_3 = 0,569$. Hasil tersebut dibandingkan dengan tabel 3.2, tabel penentu moderasi yang menunjukkan bahwa *Good Government Governance* merupakan **Homologiser**. Hasil hubungan antara Faktor Demografi dengan Penganggaran Publik pada SKPD kabupaten Mamuju, hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa H5 di tolak.

3. Variabel Literasi Keuangan (X3) terhadap Penganggaran Publik (Y) yang dimoderasi oleh *Good Government Governance* (M), menunjukkan persamaan.

Berdasarkan persamaan diatas dan tabel hasil output SPSS menunjukkan bahwa $b_2 = 0,191$ dan $b_3 = 0,043$. Hasil tersebut dibandingkan dengan tabel 3.2, tabel penentu moderasi yang menunjukkan bahwa *Good Government Governance* merupakan **Pure Moderasi**. Hasil hubungan antara Literasi Keuangan dengan Penganggaran Publik pada SKPD kabupaten Mamuju, hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa H6 di terima Hasil penelitian yang telah diterima dan ditolak secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.21
Ringkasan Hasil Penelitian

Hipotesis	Pernyataan	Hasil
H1	Tekanan Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik	Diterima
H2	Faktor demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik	Diterima
H3	Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik	Diterima
H4	<i>Good Government Governance</i> memoderasi pengaruh tekanan politik terhadap penganggaran public	Ditolak

H5	<i>Good Government Governance</i> memoderasi pengaruh faktor demografi terhadap penganggaran publik	Ditolak
H6	<i>Good Government Governance</i> memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap penganggaran publik	Diterima

Sumber : Data yang diolah (2020)

E. Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh Tekanan Politik terhadap Penganggaran Publik

Penelitian ini adalah tekanan politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap penganggaran publik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien mengalami tingkat yang signifikansi, dimana lebih kecil dari standar. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa tekanan politik berpengaruh signifikan terhadap penganggaran publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan hadirnya tekanan politik dalam penganggaran publik yang ada di kota mamuju akan memberikan dampak yang besar terhadap penganggaran publik, salah satu faktornya yaitu dimana pemerintah SKPD dimamuju sekarang lebih memikirkan solidaritas ekonomi yang dimana tentu harus mengejar target ekonomi yang tertinggal. Tekanan Politik sudah tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa mengejar ketertinggalan target ekonomi.

Tekanan politik dalam suatu proses penganggaran memang tidak dapat dihindari. Hal ini karena bentuk bentuk dari politik memberikan dampak yang besar

bagi proses penyusunan anggaran. Sebagaimana telah diketahui bahwa anggaran harus didasarkan pada ketentuan yang ada dan dialporkan sesuai dengan kaidah administrasi keuangan yang terdapat pada SAP yang tentunya akuntabel dan transparan. Seperti yang dijelaskan dalam teori *Grabbing Hand* yang menganggap bahwa tokoh politik adalah politik yang birokrat yang mengambil keuntungan dari posisi mereka di pemerintahan untuk mengambil manfaat pribadi.

Kehadiran tekanan politik sudah tidak diragukan lagi mengingat karena adanya bentuk negosiasi mengenai kebijakan yang telah ditetapkan. Pada hakikatnya, tekanan politik perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bukan sebagai gangguan, dewan politik bisa menggunakan ataupun memanfaatkan posisinya dalam mendistribusikan anggaran yang ada didaerah (Karki, 2017). Penelitian Darfina et al, (2015) menyatakan bahwa politik anggaran mendukung Penyusunan anggaran, dimana jika politik anggaran baik maka proses penyusunan anggaran dapat berjalan dengan baik pula.

2. Pengaruh Faktor Demografi terhadap Penganggaran Publik

Dalam penelitian ini adalah faktor demografi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap penganggaran publik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien variabel faktor demografi mengalami tingkat signfiikan yang dimana lebih kecil dari standar. Hasil ini menunjukkan bahwa adanya faktor demografi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam proses penganggaran publik.

Faktor demografi dikatakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangan yang dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya

perbedaan jenis kelamin, usia dan pendapatan. Usia yang lebih matang cenderung memiliki perilaku keuangan yang positif karena memiliki wawasan yang lebih luas (Mahdzan dan Tabiani, 2013). Sedangkan dalam penelitian Romadoni 2015 yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki status sosial atau pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu untuk berinteraksi dengan baik sehingga proses penganggaran akan berjalan lancar dan tentunya akan membawa dampak yang baik untuk publik.

3. Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik

Dalam penelitian ini adalah literasi keuangan berpengaruh positif terhadap penganggaran publik. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa koefisien beta *unstandardized* variabel literasi keuangan mengalami tingkat yang signifikan, yang dimana lebih kecil dari standar umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan seseorang dalam mengimplementasikan aspek-aspek keuangan tentunya proses penganggaran publik akan menjadi lebih baik.

Hal-hal yang berhubungan dengan literasi keuangan adalah bagaimana pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, berinvestasi, pinjaman atau kredit serta pengelolaan tabungan. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan, tetapi juga atribut non kognitif (PISA, 2012). Menurut Arisusanti dkk (2017) Anggaran pemerintah daerah merupakan salah satu wujud pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel. Dengan demikian literasi keuangan mempengaruhi penganggaran publik karena pengelolaan keuangan merupakan keahlian dan kemampuan yang

terbentuk untuk memanfaatkan sumber daya dalam pencapaian suatu tujuan. Sejalan dengan penelitian Ida dan Chyntia (2017) yang memperoleh hasil yang menyatakan bahwa literas keuangan berpengaruh positif terhadap penganggaran publik.

4. *Good Government Governance* Memoderasi Pengaruh Tekanan Politik terhadap Penganggaran Publik

Dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* memoderasi pengaruh tekanan politik terhadap penganggaran politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Good Government Governance*, memiliki nilai signifikan sebesar dan koefisien regresi bernilai. Dengan demikian, *good government governance* merupakan variabel yang tidak mampu memoderasi hubungan tekanan politik terhadap penganggaran publik.

Tekanan politik yang terjadi dalam proses penganggaran memang tidak bisa dihindari. Hal ini dikarenakan bentuk-bentuk dari politik memberikan dampak yang besar bagi proses penyusunan anggaran. Sebagaimana diketahui bahwa anggaran harus didasarkan pada ketentuan yang ada dan dilaporkan sesuai dengan kaidah administrasi keuangan yang terdapat pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang akuntabel dan transparan. Brautigam (2002) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan faktor sosial dan politik lainnya yang terlibat dalam dunia politik memiliki banyak suara dalam reformasi, sehingga retorika partisipatif jauh lebih simbolis dibandingkan dengan hakikatnya. Demikian pula bagi mereka yang sedang menjalankan tugas dilingkup pemerintahan, *political pressure* menjadi bagian yang melekat dan dikategorikan sebagai cara untuk menantang suatu praktek sesungguhnya (Karki, 2017).

Hakikatnya, tekanan politik hanya perlu dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bukan sebagai gangguan. Proses penyusunan anggaran publik saat ini dan kedepan ditentukan oleh kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, dan inti dari kualitas pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan. *Good Government Governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas organisasi demi mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan yang baik.

5. *Good Government Governance* Memoderasi Pengaruh Faktor Demografi terhadap Penganggaran Publik

Dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* memoderasi pengaruh faktor demografi terhadap penganggaran politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Good Government Governance* memiliki nilai signifikan dan koefisien regresi. Dengan demikian, *good government governance* merupakan variabel yang tidak mampu memoderasi hubungan faktor demografi terhadap penganggaran publik.

Faktor demografi dikatakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangan yang dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia dan pendapatan. Usia yang lebih matang cenderung memiliki perilaku keuangan yang positif karena memiliki wawasan yang lebih luas (Mahdzan dan Tabiani, 2013). Sedangkan dalam penelitian Romadoni 2015 yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki status sosial atau pendidikan yang lebih tinggi lebih mampu untuk berinteraksi dengan baik sehingga proses

penganggaran akan berjalan lancar dan tentunya akan membawa dampak yang baik untuk publik.

Good government governance merupakan suatu kondisi yang dapat menjamin adanya saling control yang di lakukan oleh beberapa komponen yang terkait yaitu pemerintah, rakyat, ataupun usahawan yang beradap disektor swasta. Komponen yang berkaitan ini memiliki hubungan yang sama dan sederajat. Bila kesamaan derajat tersebut tidak sebanding dan tidak terbukti maka akan terjadi pembiasan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Peran pemerintah yang saat ini telah berpindah dari *government* ke *governance*, dengan mengutamakan kepentingan public. *Good government governance* merupakan tata kelola yang baik dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini *good government governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara faktor demografi terhadap penganggaran publik.

6. *Good Government Governance* Memoderasi Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik

Dalam penelitian ini adalah *Good Government Governance* memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap penganggaran politik. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel *Good Government Governance* memiliki nilai signifikan dan koefisien regresi. Dengan demikian, *good government governance* merupakan variabel yang mampu memoderasi hubungan faktor demografi terhadap penganggaran publik.

Literasi keuangan dikatakan berkaitan erat dengan manajemen keuangan khususnya terkait penganggaran dalam lingkup sektor publik. Semakin tinggi tingkat literasi keuangan maka semakin baik pula manajemen keuangan keuangan

seseorang tersebut (Nidar dan Bestari, 2012). Manajemen keuangan dalam pemerintah meliputi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran yang tentunya sangat penting untuk kelangsungan hidupnya. Literasi keuangan dikaitkan berkaitan dengan penganggaran publik karena keputusan penganggaran yang diambil oleh seorang individu tentunya akan lebih jelas dan benar karena telah mengerti dengan baik terkait anggaran yang ada dan akan mempertimbangkan lebih baik dampak yang akan dihadapi dimasa yang akan datang (Chinen dan Endo, 2012).

Bijak atau tidaknya aktivitas perencanaan dan pengelolaa anggaran tentunya tidak lepas dari bagaimana tata kelola yang baik dalam sistem pemerintah. Ketika sistem atau pengelolaan yang ada dalam pemerintahan berjalan dengan baik khususnya lebih memperhatikan kemampuan serta pengetahuan seseorang dalam konsep keuangan atau yang biasa disebut dengan literasi keuangan tentunya anggaran dalam pemerintahan akan aman saja. Sesuai dengan deifnisi dari literasi keuangan tersebut yaitu bagaimana kecerdasan atau kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya yang jika diinternalisasikan kedalam sistem pemerintahan berarti individual yang mengerti terkait perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran publik.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi, dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran publik dengan *good government governance* sebagai variabel moderasi pada Satuan Kerja Pada Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Mamuju

1. Dengan adanya Tekanan Politik pada saat Penganggaran publik cenderung akan meningkatkan keefisienan anggaran yang dihasilkan pada pemerintah kabupaten Mamuju. Tekanan Politik dalam Penganggaran Publik yang terdapat pada kota mamuju akan memberikan dampak yang besar pada penganggaran publik yang dimana Tekanan politik sudah tidak bisa dijadikan alasan bagi pemerintah untuk tidak bisa mengejar ketinggalan target.
2. adanya faktor demografi dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam proses penganggaran publik yang dimana dikatakan dapat mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangan yang dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia dan pendapatan. Usia yang lebih matang cenderung memiliki perilaku keuangan yang positif karena memiliki wawasan yang lebih luas.
3. Dalam pemerintahan literasi keuangan adalah bagaimana pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, berinvestasi, pinjaman atau kredit serta pengelolaan tabungan. Literasi keuangan tidak hanya melibatkan

pengetahuan dan kemampuan untuk menangani masalah keuangan, tetapi juga atribut non kognitif bahwa semakin tinggi pengetahuan tentang keuangan dan kemampuan seseorang dalam mengimpelementasikan aspek-aspek keuangan tentunya proses penganggaran publik akan menjadi lebih baik.

4. *Good government governance* tidak mampu mempengaruhi Tekanan Politik terhadap Penganggaran publik. Hal ini dikarenakan tekanan politik khususnya politik anggaran dianggap memiliki peranan penting dalam penganggaran publik karena dapat mengakomodir program atau kegiatan yang belum terakomodir di kebijakan umum APBD yang ada di kabupaten Mamuju. Akibat yang ditimbulkan dari penerepan teori agensi dalam politik penganggaran dapat menimbulkan hal positif dalam bentuk efisiensi. Namun, perlu juga menjadi catatan, bahwa tekanan politik juga dapat memunculkan dampak negatif.
5. *Good government governance* tidak mampu mempengaruhi Faktor Demografi terhadap penganggaran publik. Hal ini dikarenakan karena seseorang, termasuk dalam mengelola perilaku keuangan yang dimana secara tidak langsung persepsi dan sikap individu cenderung memiliki perbedaan dengan adanya perbedaan jenis kelamin, usia dan pendapatan.
6. *Good government governance* mampu memperkuat Literasi Keuangan terhadap Penganggaran publik. Hal ini dikarenakan Literasi keuangan dikaitkan berkaitan dengan penganggaran publik karena keputusan penganggaran yang diambil oleh seorang individu tentunya akan lebih jelas

dan benar karena telah mengerti dengan baik terkait anggaran yang ada dan akan mempertimbangkan lebih baik dampak yang akan dihadapi dimasa yang akan datang .

Maka dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan *good government governance* dengan variabel Tekanan politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan pada pemerintahan kabupaten telah berjalan dengan cukup baik terlihat dari setiap tanggapan responden dan pernyataan di tiap indikator termaksud dalam kategori cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa prinsip-prinsip *Good Government Governance* seperti partisipasi, transparan dan akuntabilitas telah dijalankan dengan cukup baik oleh pemerintah daerah di Kabupaten Mamuju.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Pelaksanaan pengukuran yang tidak menghadapkan responden dengan kondisi nyata dikhawatirkan menyebabkan responden menjawab pertanyaan survey secara normative, sehingga hasil penelitian ini bisa saja menjadi bias dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
2. Dari jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Mamuju hanya 17 SKPD yang bersedia mengisi kuesioner. Hal ini disebabkan karena permasalahan perizinan yang rumit dan kesibukan pelatihan serta kunjungan kerja para pegawai pada SKPD tersebut. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian, bukan hanya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, tetapi juga dapat dilakukan pada

kantor DPRD, BUMD, dalam lembaga sejenisnya yang berkaitan langsung dengan proses penyusunan anggaran publik.

C. *Implikasi Penelitian*

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan. Adapun implikasi dari penelitian yang telah dilakukan, yakni dinyatakan dalam bentuk saran-saran yang diberikan melalui hasil penelitian agar dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Bagi penyusun anggaran diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif pada saat menyusun anggaran. Karena dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Government Governance* maka faktor-faktor negatif yang dapat mengganggu pada saat penganggaran publik dapat diminimalisir.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Mamuju diharapkan untuk lebih memaksimalkan sumber daya manusia dalam mencegah perilaku-perilaku yang dapat merugikan banyak pihak. Sehingga program kerja yang dihasilkan mampu memberikan dampak yang maksimal kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Karim. 2014. Kementrian Agama Republik Indonesia. Surakarta: Ziyad.
- Angraeni, Mariska Dewi. 2011. Agency Theory Dalam Perspektif Islam. *JHI*, 9(2): 1-13.
- Andrew, Vincentius., Linawati, Nanik. 2014. Hubungan Faktor Demografi dan Pengetahuan Keuangan dengan Perilaku Keuangan Karyawan Swasta di Surabaya. *FINESTA* 02, no.02.
- Atmaja, R., Ramatha, I. W. Dan Suartana, I. W. 2017. Pengaruh Minat Pelajar pada Pemahaman Akuntansi dengan Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Spiritual sebagai Pemoderasi. *E-jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(5): 2021-2046.
- Ayub, Rai D., Made S. Utama, dan I Gede Wardana. 2018. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Governance pada Pemerintah Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 7(4): 987-1022.
- Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga.
- Brautigam, D. 2002. The People's Budget? Politics, Participation, and Pro Poor Policy. *Development Policy Review*, 22(6): 653-668.
- Dewi, N. W. S., Dr. Edy Sujana, dan Ni K. Sinarwati. 2015. Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, dan Komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Kasus pada Skpd Kabupaten Karangasem). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3): 1-11.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grant, W. 2001. Pressure Politics: From "Insider" Politics to Direct Action?. *Society for Parliamentary Government*, 54(1): 337-348.
- Handra, Hefrizal dan Maryati, Sri. 2009. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukan Pajak Pemerintah Propinsi Sumatra Barat. Konferensi Penelitian Keuangan Sektor Publik II Badan Litbang Departemen Dalam Negeri.
- Handi Y. L Dan Bambang Jatmiko. 2016. Key Success Factor Good Government Governance Serta Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pemerintah (Survey Pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul). *Jurnal Unimus* . 5(1): 32-49.
- Harli dan Felicia Claresta. 2015. Pengaruh Financial Literacy dan Faktor Sosiodemografi Terhadap Perilaku Konsumtif. *Jurnal Finesta*, 3(1): 58-62.
- Hariyadi. 2016. Politik Anggaran 2017 dan Tantangan Percepatan Pembangunan Nasional. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(16): 1-4.
- Hikmah, N., Busaini, dan S. Pancawati. 2015. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Politik Penganggaran, dan Transparansi Publik terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Akuntansi Akrua*, 3(1): 103-115.

- Houston. 2010. Measuring Financial Literacy. *Journal The of Consumer Affair*, 44(2).
<http://kotamamuju.blogspot.com/2011/06/daerah-kabupaten-mamuju-merupakan-salah.html>
<https://www.facebook.com/741664522528705/posts/-sejarah-mamuju-penetapan-hari-jadi-mamuju-sebagai-salah-satu-kabupaten-di-sulaw/742530792442078/>
https://www.google.com/search?q=logo+kabupaten+Mamuju&safe=strict&sxsrf=ALeKk03y2ptGOk2t_6Gi2zwQV_LPciDjHw:1582976032844&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fg_nlgVZQcPcQM%253A%252CykvHljXHc89KIM%252C_&vet=1&usg=AI4_-
<http://mamujukab.go.id/profil/sejarah/>
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mamuju
- Idward, N. Nurul, Jamaluddin Majid, dan Mediyati. 2018. The Effect of Competence of Human Resources, Information Technology and Accountability on The Quality of Regional Financial Statements with Internal Control Systems As a Moderation. *International Journal Economics Management and Social Science*, 1(4): 142-155
- Indriantoro, Nur dan Bambang S. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta. Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
- Karki, T. K. 2017. What Should Planners do to Address Unethical Political Pressure?. *Planning Practice Research*, 37(1): 1-18.
- Kusumawardani, 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Accounting Analysis*, 1(1): 2252-6765.
- Latifah, Nurul P. 2010. Adakah Perilaku Oportunistik dalam Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik?. *Jurnal Fokus Ekonomi*, 5(2): 85-94.
- Lusardi, A. 2009. US Household Savings Behavior: The Role of Financial Literacy : Information and Financial Education Programs. *Joernal Policy making Insights from Behavioural Economics*, hlm 109-149.
- Maryam, Neneng Siti. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 6(1): 1-18.
- Maulamin, T., A. Cholik, dan E. T. Alawiah. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Jurnal Transparansi*, 1(2): 259-282.
- Megasari, I. A. G. Sutha. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 20(2): 130-137.
- Mentang, Fanda J., Nitha E. Makaminang, dan David P. E. Saerang. 2018. Iptek Proses Penyusunan Anggaran Sektor Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kota Manado. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 2(2): 385-389.

- Maulamin, T., A. Cholikh, dan E. T. Alawiah. 2018. Pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Pengelolaan Anggaran pada Instansi Pemerintah (Studi pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten). *Jurnal Transparansi*, 1(2): 259-282.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta : Andi.
- Natalia, P. L. Natalia., L. Kalangi, dan J. D. L Warongan. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Transparansi dan Pengendalian Akuntansi dan Pengendalian Akuntansi terhadap Kinerja Manajerial pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1): 115-121.
- Nugroho, Yogi P., Basuki, dan Zaenal Fanani. 2017. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam Proses Pencairan Dana APBN Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing, & Informasi*, 17(1): 67-80.
- Oktarina, Mia., R. Kharis, dan R. Andini. 2016. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014). *Journal of Accounting*, 2(2): 1-15.
- PISA. 2012. Financial Literacy Framework. *Joernal Internasional*.
- Pratiwi, Ratih Nur. 2018. Politisasi Anggaran Sektor Publik. hlm 1-9.
- Purnomo, A. Dwi dan Ulyani. 2016. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Anggaran pada Pemerintah Kabupaten Lebak. *Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis*, 4(1): 1-6.
- Rahayuningtyas, D. P. Amrih dan D. Setyaningrum. 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-government terhadap Korupsi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4): 431-450.
- Raaij, W.Fred. Financial Literacy and Financial Behavior. Tilburg University. Jurnal, 2016.
- Romarina, A. dan Makhfath, A. 2010. Faktor – Faktor Risiko Fiskal Dalam Penganggaran Daerah Daerah. *Jurnal BPPK*, 1: 31-49.
- Rita, M.R .& Kusumawati,R. 2010. Pengaruh variabel sosio demografi dan karakteristik finansial terhadap sikap, normasubjektif dan control perilaku menggunakan kartu kredit, hlm 109-128.
- Remund, D L. 2010. Financial literacy explicated: the case for a clearer definition in an increasingly complex economy. *Journal of Consumer Affairs*, 44(2).
- Romarina, A. dan Makhfath, A. 2010. Faktor-Faktor Risikol fiskal Dalam Penganggaran Daerah. *Jurnal BPPK*, 1(2): 32-49.
- Saputro, F., B. S. Irianto, dan E. Herwiyanti. 2016. Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik. *Soedirman Accounting Review*, 1(1): 21-39
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

- Sulton, S. 2018. Siklus Politik Anggaran di Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Aristo*.
- Sunarmo, A., R. Widianingsih, U. Pratiwi, dan T. Hidayat. 2018. Penerapan Prinsip-prinsip Good Government Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kompetensi Sdm terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1): 9-18.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syahrir, Anggia Dini. 2017. Pengaruh Penganggaran Partisipatif terhadap Budget Slack dengan Sikap sebagai Variabel Moderating. *Jurnal InFestasi*, 13(1): 243-252.
- Tobinga, M, S, L dan Brodjonegorob, B, P, S. 2013. Faktor Politik dalam Alokasi Dana Antarpemerintah Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesi*, 13(2): 143-158.
- Tulle, S., J. J. Sondakh, dan L. M. Mawikere. 2018. Analisis Penerapan Prinsip Good Governance di Kantor Samsat Amurang. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(3): 527-532.
- Wance, M. 2017. Politik Anggaran Eksekutif dan Legislatif Pada Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015. *Jurnal Of Government*. 2(2): 178-204.
- Widayati, I. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Literasi Finansial Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya. *Jurnal Akutansi dan Pendidikan*.
- Wiranto, R., I. Awaluddin, dan M. Akib. 2019. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Good Government Governance, Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pt. Pln Persero Sub Rayon Wua-wua dan Benua Benua. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, 4(1): 27-35.
- Xu, Lisa., dan Bilal Zia. 2012. Financial Literacy around the World – An Overview of the Evidence with Practical Suggestions for the Way Forward. The World Bank: Finance and Private Sector Development.
- Yasin, M. dan Adioetomo, S. M., 2010, “Demografi: Arti dan Tujuan”, dalam Dasar-dasar Demografi Edisi 2, diedit oleh Adioetomo, S. M. dan Samosir, O. B., Jakarta: Salemba Empat.
- Yuhertiana, I. Pranoto, S dan Priono, H. 2015. Perilaku Disfungsional Pada Siklus Penganggaran Pemerintah: Tahap Perencanaan Anggaran. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 19(1): 25-38.
- Yusniar, Darwanis, dan Syukriy Abdullah. 2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern Terhadap Good Governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPD Pemerintah Aceh). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 5(2): 100-115.
- Yusnita, R, R, dan Abdi, M. 2018. Pengaruh Faktor Demografi Terhadap Literasi Keuangan. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 2(1): 2597-5234.
- Zyen, E. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1): 21-36.

Zuhriansyah, M. 2013. Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 2(2): 311-319.

L

A

M

P

I

R

A

N

A. KOESIONER PENELITIAN

IDENTITAS RESPONDEN

Mohon dijawab pada isian yang telah disediakan dan pilihlah jawaban pada pertanyaan pilihan dengan memberi tanda (v) pada satu jawaban yang sesuai dengan kondisi Bapak/Ibu.

1. Nama (boleh tidak diisi) :
2. Nama Instansi Pemerintah :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin : Pria ☐ Wanita ☐
5. Pendidikan Terakhir : S3 ☐ S2 ☐ S1 ☐ D3 ☐
6. Jabatan :
7. Lama Kerja :Tahun.....Bulan

Cara Pengisian Kuesioner

Bapak/Ibu cukup memberikan tanda (v) pada pilihan jawaban yang tersedia (rentang angka dari 1 sampai dengan 5). Setiap pernyataan mengharapkan hanya satu jawaban dan setiap angka akan mewakili tingkat kesesuaian dengan pendapat yang diberikan :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Ragu-Ragu/Netral
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

A. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL TEKANAN POLITIK

NO	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :						
1.	Perubahan plafon program / kegiatan yang diusulkan oleh Badan Anggaran disetujui oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.					
2.	Badan Anggaran mempunyai hak dalam melakukan perubahan program dan kegiatan jika program dan kegiatan tersebut dianggap tidak layak untuk dilaksanakan.					
3.	Kemampuan Badan Anggaran dalam Memutuskan program/kegiatan mana yang tidak prioritas masih kurang sehingga menyebabkan salah dalam menentukan perubahan program dan kegiatan.					
4.	Tim anggaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan program dan kegiatan yang telah disusun dengan memberikan penjelasan dan pertimbangan mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.					
5.	Perubahan program/kegiatan oleh Badan Anggaran dikarenakan SKPD					

	tidak dapat mempertahankan dan memberikan alasan mengapa anggaran program/kegiatan tersebut dianggarkan.					
6.	Politik penganggaran berdampak baik dalam penyusunan APBD karena dapat mengakomodir program/kegiatan yang belum terakomodir di Kebijakan umum apbd.					

B. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL FAKTOR DEMOGRAFI

NO	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :						
1.	Semakin tinggi tingkat pendidikan saya, maka semakin baik pula dalam menganggarkan untuk masyarakat					
2.	Jenis kelamin seseorang sangat menentukan tingkat kebijaksanaan dalam menganggarkan					
3.	Semakin lama saya bekerja, semakin membuat saya mampu memahami penganggaran					
4.	Semakin banyak pengalaman yang saya miliki, maka semakin baik pula dalam menganggarkan					
5.	Semakin tua umur saya, maka semakin bijak dalam menganggarkan untuk masyarakat					
6.	Dengan pangkat/golongan yang saya miliki saat ini dapat mempengaruhi dalam melaksanakan tugas dengan baik untuk masyarakat					

C. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL LITERASI KEUANGAN

NO	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :						
1.	Pengetahuan keuangan yang saya miliki sangat bermanfaat bagi penganggaran					
2.	Penganggaran keuangan bermanfaat untuk penggunaan uang yang terarah dan menghindari pemborosan.					
3.	Literasi keuangan yang saya miliki membantu saya dalam memahami produk keuangan yang aman.					
4.	Kemampuan perencanaan keuangan sangat diperlukan dalam penganggaran.					
5.	Mengelola keuangan dengan baik dapat membantu membuat perencanaan jangka panjang dan jangka pendek					

D. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE

NO	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :						
1.	Pemerintah daerah menjamin adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan pemerintahan daerah dan telah dilaksanakan tanpa diskriminasi dan adanya benturan kepentingan					
2.	Dalam menyusun anggaran segala proses dan tahapan penyusunan dilakukan secara tertib, aman, dan terbuka					
3.	Data dan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dapat diperoleh					

	oleh pengguna laporan tersebut demi kepentingan bersama					
4.	Penggunaan anggaran pada SKPD telah sesuai dengan alokasinya					
5.	Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan dilaksanakan secara periodik melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan disampaikan tepat pada waktunya.					
6.	Anggaran yang disusun dalam pengelolaan keuangan SKPD telah ditetapkan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah					

E. DAFTAR PERNYATAAN UNTUK VARIABEL PROSES PENGANGGARAN PUBLIK

NO	PERNYATAAN	NILAI				
		SS	S	N	TS	STS
		5	4	3	2	1
Bagaimana Pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan berikut :						
1.	Dalam penyusunan anggaran semua pihak yang berkaitan ikut dilibatkan					
2.	Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan prinsip – prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam rangka pencapaian prestasi kerja.					
3.	Anggaran yang disusun oleh masing-masing SKPD harus berdasarkan KUA-PPAS yang telah disetujui oleh DPRD dan Kepala Daerah					
4.	Pejabat yang terlibat dalam penyusunan RKA-SKPD memahami cara menyusun RKA untuk penyusunan APBD.					

5.	Proses penganggaran sesuai dengan aspirasi masyarakat					
6.	Selalu menggunakan informasi-informasi mengenai anggaran masa lalu dalam membuat suatu perencanaan anggaran.					

A. REKAPITULASI JAWABAN RESPONDEN

No	TEKANAN POLITIK (X1)						TOTAL
	X1	X1	X1	X1	X1	X1	
	1	2	3	4	5	6	
1	4	4	4	4	4	4	24
2	3	3	3	4	2	3	18
3	5	2	3	4	4	4	22
4	5	4	4	4	4	4	25
5	5	5	3	5	2	3	23
6	4	4	3	4	4	3	22
7	5	4	4	4	4	4	25
8	4	4	4	4	4	4	24
9	2	4	4	4	4	4	22
10	4	4	4	4	5	4	25
11	3	4	4	4	3	4	22
12	5	4	4	4	4	4	25
13	4	4	4	4	4	4	24
14	5	4	4	4	5	4	26
15	4	4	3	3	4	4	22
16	5	4	4	5	5	4	27
17	5	2	3	4	4	4	22
18	5	5	4	3	4	4	25
19	4	2	4	4	4	3	21
20	3	4	5	5	5	4	26
21	2	4	4	3	4	4	21
22	5	5	5	4	5	5	29
23	4	5	5	4	4	3	25
24	4	4	3	2	4	3	20
25	4	4	4	4	4	4	24
26	4	4	5	5	4	4	26

27	4	4	2	5	2	2	19
28	3	4	4	5	4	4	24
29	4	4	4	4	4	4	24
30	5	3	2	4	2	3	19
31	3	4	4	5	4	4	24
32	4	4	2	4	2	2	18
33	4	4	4	5	5	4	26
34	4	4	4	4	5	4	25
35	3	4	4	5	4	4	24
36	4	4	5	4	4	4	25
37	4	4	5	4	4	4	25
38	4	5	5	4	4	4	26
39	4	4	2	4	2	4	20
40	4	4	3	3	4	4	22
41	4	3	4	5	5	4	25
42	4	5	2	4	4	4	23
43	3	3	3	3	3	3	18
44	4	5	5	4	4	4	26
45	4	2	3	4	4	3	20
46	4	5	4	4	4	4	25
47	4	5	3	5	4	4	25
48	5	5	5	5	5	5	30
49	4	2	5	4	4	5	24
50	4	5	3	5	3	4	24
51	4	3	4	4	2	4	21
52	5	5	5	5	5	5	30
53	4	4	3	4	2	4	21
54	4	4	4	5	4	4	25
55	2	2	3	3	2	2	14
56	4	4	2	4	4	4	22
57	5	4	4	5	5	5	28
58	5	5	5	5	5	5	30
59	4	4	4	4	4	2	22
60	4	5	5	4	4	4	26
61	4	5	5	5	4	4	27
62	4	5	5	4	4	4	26
63	4	5	5	5	4	4	27
64	4	4	3	3	4	1	19
65	4	5	3	5	4	4	25
66	3	3	3	3	4	5	21
67	4	3	3	3	3	2	18

68	4	4	3	4	4	4	23
----	---	---	---	---	---	---	----

NO	FAKTOR DEMOGRAFI (X2)						TOTAL
	X2	X2	X2	X2	X2	X2	
	1	2	3	4	5	6	
1	4	5	5	5	2	4	25
2	5	5	4	4	4	4	26
3	4	4	4	4	4	4	24
4	4	4	4	4	4	4	24
5	4	5	5	5	2	4	25
6	5	4	4	5	5	5	28
7	5	5	5	5	5	5	30
8	4	5	4	5	5	4	27
9	5	5	5	4	5	2	26
10	4	4	5	5	4	5	27
11	4	5	4	4	4	4	25
12	4	4	3	3	4	4	22
13	4	5	5	5	2	4	25
14	3	5	5	3	3	4	23
15	4	4	5	4	5	5	27
16	5	2	3	4	4	4	22
17	4	4	5	5	4	5	27
18	5	5	5	4	4	5	28
19	4	4	3	2	4	3	20
20	5	5	5	5	5	5	30
21	4	5	4	5	3	5	26
22	5	5	5	5	5	5	30
23	4	4	3	3	4	4	22
24	4	5	5	5	4	4	27
25	3	5	5	4	3	4	24
26	4	4	4	5	4	4	25
27	4	4	5	5	4	5	27
28	4	3	4	4	2	2	19
29	5	5	4	4	3	2	23
30	4	2	2	4	3	3	18
31	4	4	3	2	4	3	20
32	3	4	4	5	4	4	24
33	4	4	4	5	5	4	26
34	4	4	4	4	4	4	24

35	4	4	4	4	4	1	21
36	5	5	5	5	5	5	30
37	4	3	3	4	4	3	21
38	4	4	5	4	4	5	26
39	4	4	4	5	5	3	25
40	4	4	4	5	5	4	26
41	4	4	4	4	3	3	22
42	5	4	5	5	3	2	24
43	4	4	5	4	5	3	25
44	5	4	5	4	4	3	25
45	5	4	5	4	4	4	26
46	4	4	5	5	4	5	27
47	4	4	4	3	4	4	23
48	4	5	4	4	4	3	24
49	3	4	5	4	4	4	24
50	4	4	4	5	4	4	25
51	5	5	4	4	4	3	25
52	4	4	5	4	3	4	24
53	5	4	5	5	3	2	24
54	5	5	4	4	3	2	23
55	3	3	2	2	2	3	15
56	4	3	4	3	3	3	20
57	5	4	4	4	4	4	25
58	4	5	5	5	5	5	29
59	4	4	4	4	5	4	25
60	4	4	4	4	4	4	24
61	4	4	4	4	3	3	22
62	5	5	5	5	5	4	29
63	5	5	5	5	5	5	30
64	4	4	4	4	3	3	22
65	5	5	5	5	5	5	30
66	3	4	3	3	3	4	20
67	3	5	4	4	4	2	22
68	3	3	4	3	3	3	19

No	LITERASI KEUANGAN (X3)					TOTAL
	X3	X3	X3	X3	X3	
	1	2	3	4	5	

1	4	4	4	5	4	21
2	5	4	4	5	5	23
3	5	4	4	5	5	23
4	4	5	4	4	4	21
5	4	5	4	4	4	21
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	5	21
8	3	5	3	4	5	20
9	3	5	4	5	4	21
10	4	4	4	4	4	20
11	4	4	4	4	4	20
12	4	4	4	5	5	22
13	4	4	4	5	4	21
14	4	4	4	4	4	20
15	4	4	4	5	4	21
16	4	4	4	5	5	22
17	4	4	4	5	5	22
18	4	4	4	5	4	21
19	5	5	5	5	5	25
20	4	5	4	5	4	22
21	4	4	4	4	4	20
22	5	5	5	4	5	24
23	5	5	5	5	5	25
24	4	5	4	4	4	21
25	4	5	5	5	5	24
26	4	4	4	4	4	20
27	5	5	5	5	5	25
28	3	4	4	4	5	20
29	4	4	3	3	3	17
30	4	5	4	5	4	22
31	5	4	4	5	5	23
32	5	5	5	5	5	25
33	4	5	5	5	5	24
34	4	4	4	4	4	20
35	4	4	4	4	4	20
36	4	5	4	5	5	23
37	5	5	5	5	5	25
38	4	4	3	3	4	18
39	4	4	4	4	4	20
40	4	5	5	5	5	24
41	4	5	4	5	5	23

42	4	5	4	5	5	23
43	4	5	4	5	4	22
44	4	4	4	5	4	21
45	4	5	4	5	5	23
46	5	5	5	5	5	25
47	4	5	4	5	5	23
48	5	5	4	5	5	24
49	5	4	4	5	5	23
50	5	5	4	5	5	24
51	5	4	4	5	5	23
52	5	4	5	5	4	23
53	5	5	5	5	5	25
54	5	5	5	4	5	24
55	3	3	2	2	2	12
56	5	5	5	5	5	25
57	5	5	5	5	5	25
58	4	4	4	4	5	21
59	5	5	5	5	5	25
60	4	5	4	5	5	23
61	5	4	5	5	4	23
62	4	5	5	5	5	24
63	4	4	4	4	5	21
64	5	5	5	5	4	24
65	5	4	4	5	5	23
66	4	4	5	4	4	21
67	4	5	4	5	4	22
68	3	3	3	3	3	15

No	GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE						TOTAL
	X4	X4	X4	X4	X4	X4	
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
1	4	4	4	4	5	4	25
3	4	4	4	3	4	4	23
4	4	4	4	4	5	4	25
5	4	5	5	5	5	5	29
6	5	5	5	5	5	5	30
7	5	5	4	4	5	5	28
8	4	5	4	5	5	4	27

9	5	5	5	5	5	5	30
10	5	5	5	5	5	5	30
11	4	5	5	5	5	5	29
12	4	4	4	4	3	3	22
13	5	5	4	4	4	4	26
14	5	5	5	5	5	5	30
15	5	5	5	5	5	5	30
16	5	5	5	5	5	5	30
17	4	4	5	5	4	5	27
18	5	5	5	4	4	5	28
19	5	5	5	4	5	5	29
20	5	5	5	4	4	5	28
21	5	5	5	4	5	5	29
22	5	5	5	5	5	5	30
23	5	5	3	5	5	5	28
24	4	4	4	4	4	4	24
25	4	5	4	4	4	4	25
26	4	4	4	4	5	4	25
27	5	4	3	4	5	4	25
28	5	4	3	4	5	4	25
29	1	5	5	5	5	5	26
30	4	4	3	4	4	5	24
31	4	5	4	4	4	4	25
32	5	5	4	4	5	4	27
33	4	5	4	4	4	5	26
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	4	4	4	5	5	26
37	5	5	4	4	5	4	27
38	4	5	4	4	5	4	26
39	4	4	4	4	4	4	24
40	4	4	4	2	4	4	22
41	4	5	5	4	4	4	26
42	4	4	4	3	3	4	22
43	4	4	4	4	4	4	24
44	1	5	5	5	5	5	26
45	4	5	5	5	5	5	29
46	5	4	4	4	5	5	27
47	5	5	4	4	5	4	27
48	4	4	4	4	4	4	24
49	4	5	5	5	5	5	29

50	4	4	4	3	3	4	22
51	4	4	4	4	5	4	25
52	5	5	4	4	5	4	27
53	4	5	4	4	4	4	25
54	4	4	4	4	5	4	25
55	4	4	4	5	5	4	26
56	3	4	4	4	4	3	22
57	4	3	3	3	3	4	20
58	4	4	4	4	4	4	24
59	4	4	4	4	5	5	26
60	4	3	4	5	5	3	24
61	4	4	4	4	4	4	24
62	2	5	2	5	4	4	22
63	4	4	4	4	4	4	24
64	4	4	4	4	4	4	24
65	5	5	4	5	5	5	29
66	4	5	5	5	5	5	29
67	4	5	5	5	5	5	29
68	4	4	4	4	5	4	25

NO	PENGANGGARAN PUBLIK						TOTAL
	X5	X5	X5	X5	X5	X5	
	1	2	3	4	5	6	
1	4	5	5	5	2	4	25
2	5	5	5	5	2	2	24
3	5	5	5	5	2	2	24
4	4	4	5	5	4	4	26
5	4	4	4	4	4	4	24
6	4	4	4	4	4	4	24
7	5	5	4	4	4	4	26
8	4	4	4	4	4	4	24
9	3	5	5	3	3	4	23
10	4	4	4	4	4	4	24
11	4	4	4	4	4	4	24
12	4	5	4	5	3	4	25
13	4	4	4	4	4	4	24
14	4	3	4	4	4	4	23
15	4	5	5	5	3	4	26
16	4	4	4	4	4	4	24
17	4	4	5	5	4	4	26

18	4	5	5	5	3	4	26
19	4	5	4	5	3	5	26
20	5	5	5	5	4	5	29
21	4	4	4	4	4	4	24
22	5	5	5	5	5	4	29
23	5	5	5	5	5	4	29
24	5	4	4	5	4	4	26
25	4	5	5	5	4	4	27
26	5	5	5	5	4	4	28
27	4	4	3	3	4	4	22
28	4	5	4	3	4	4	24
29	3	5	5	4	3	4	24
30	4	3	3	3	3	4	20
31	4	5	4	4	4	4	25
32	4	4	5	5	4	4	26
33	4	5	5	5	4	4	27
34	4	4	4	4	4	4	24
35	4	4	4	4	4	4	24
36	4	5	5	5	4	4	27
37	4	4	5	5	4	4	26
38	4	4	4	4	4	4	24
39	4	4	5	5	4	4	26
40	4	5	5	5	4	4	27
41	4	4	5	4	4	3	24
42	4	4	5	4	4	3	24
43	3	5	4	4	4	3	23
44	4	5	4	5	4	3	25
45	4	5	5	4	4	3	25
46	5	5	5	5	4	3	27
47	4	4	4	4	3	3	22
48	5	5	5	5	5	5	30
49	5	5	4	5	5	5	29
50	5	5	5	5	5	5	30
51	5	5	4	5	5	5	29
52	5	5	5	4	3	5	27
53	3	4	4	4	4	4	23
54	5	5	5	5	5	5	30
55	2	3	2	3	4	2	16
56	5	4	4	5	4	4	26
57	4	4	4	3	4	5	24
58	5	5	5	5	5	5	30

59	5	5	5	5	5	5	30
60	5	5	5	4	5	5	29
61	5	5	4	5	4	5	28
62	5	5	5	5	4	5	29
63	5	5	5	5	4	5	29
64	4	4	4	4	4	5	25
65	4	5	4	4	4	2	23
66	4	4	4	4	4	2	22
67	3	3	4	4	4	2	20
68	4	4	3	3	4	4	22

B. STATISTIK DESKRIPTIF

1. Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Tekanan Politik	68	14,00	30,00	23,5441	3,13590
Faktor Demografi	68	15,00	30,00	24,5294	3,14558
Literasi Keuangan	68	12,00	25,00	22,0147	2,40331
Good Government Governance	68	20,00	30,00	26,0882	2,53769
Penganggaran Publik	68	16,00	30,00	25,3971	2,73256
Valid N (listwise)	68				

2. Statistik Deskriptif Pertanyaan

a. Tekanan Politik

Statistics						
	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6
N	Valid 68	68	68	68	68	68
	Missing 0	0	0	0	0	0
Mean	4,0147	3,9853	3,7794	4,1324	3,8529	3,7794
Sum	273,00	271,00	257,00	281,00	262,00	257,00

X1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	4,4	4,4	4,4
Ragu-Ragu	8	11,8	11,8	16,2
Valid Setuju	42	61,8	61,8	77,9
Sangat Setuju	15	22,1	22,1	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	6	8,8	8,8	8,8
Ragu-Ragu	7	10,3	10,3	19,1
Valid Setuju	37	54,4	54,4	73,5
Sangat Setuju	18	26,5	26,5	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	6	8,8	8,8	8,8
Ragu-Ragu	19	27,9	27,9	36,8
Valid Setuju	27	39,7	39,7	76,5
Sangat Setuju	16	23,5	23,5	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Ragu-Ragu	9	13,2	13,2	14,7
Valid Setuju	38	55,9	55,9	70,6
Sangat Setuju	20	29,4	29,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	9	13,2	13,2	13,2
Ragu-Ragu	4	5,9	5,9	19,1
Valid Setuju	43	63,2	63,2	82,4
Sangat Setuju	12	17,6	17,6	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Tidak Setuju	5	7,4	7,4	8,8
Valid Ragu-Ragu	9	13,2	13,2	22,1
Setuju	46	67,6	67,6	89,7
Sangat Setuju	7	10,3	10,3	100,0
Total	68	100,0	100,0	

b. Faktor Demografi

Statistics

	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6
N Valid	68	68	68	68	68	68
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	4,1765	4,2353	4,2647	4,2059	3,8824	3,7647
Sum	284,00	288,00	290,00	286,00	264,00	256,00

X2.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	8	11,8	11,8	11,8
Valid Setuju	40	58,8	58,8	70,6
Sangat Setuju	20	29,4	29,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X2.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	2,9	2,9	2,9
Ragu-Ragu	5	7,4	7,4	10,3
Valid Setuju	36	52,9	52,9	63,2
Sangat Setuju	25	36,8	36,8	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	2	2,9	2,9	2,9
Ragu-Ragu	7	10,3	10,3	13,2
Valid Setuju	30	44,1	44,1	57,4
Sangat Setuju	29	42,6	42,6	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	4,4	4,4	4,4
Ragu-Ragu	7	10,3	10,3	14,7
Valid Setuju	31	45,6	45,6	60,3
Sangat Setuju	27	39,7	39,7	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	5	7,4	7,4	7,4
Ragu-Ragu	15	22,1	22,1	29,4
Valid Setuju	31	45,6	45,6	75,0
Sangat Setuju	17	25,0	25,0	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Sangat Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Tidak Setuju	7	10,3	10,3	11,8
Ragu-Ragu	15	22,1	22,1	33,8
Setuju	29	42,6	42,6	76,5
Sangat Setuju	16	23,5	23,5	100,0
Total	68	100,0	100,0	

c. Literasi Keuangan

Statistics

	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5
N Valid	68	68	68	68	68
Missing	0	0	0	0	0
Mean	4,2647	4,4706	4,2059	4,5735	4,5000
Sum	290,00	304,00	286,00	311,00	306,00

X3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	5	7,4	7,4	7,4
Setuju	40	58,8	58,8	66,2
Sangat Setuju	23	33,8	33,8	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	2	2,9	2,9	2,9
Setuju	32	47,1	47,1	50,0
Sangat Setuju	34	50,0	50,0	100,0
Total	68	100,0	100,0	

X3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
	Ragu-Ragu	4	5,9	5,9	7,4
Valid	Setuju	43	63,2	63,2	70,6
	Sangat Setuju	20	29,4	29,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
	Ragu-Ragu	3	4,4	4,4	5,9
Valid	Setuju	20	29,4	29,4	35,3
	Sangat Setuju	44	64,7	64,7	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

X3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
	Ragu-Ragu	2	2,9	2,9	4,4
Valid	Setuju	27	39,7	39,7	44,1
	Sangat Setuju	38	55,9	55,9	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

d. Good Government Governance

Statistics

		M1	M2	M3	M4	M5	M6
N	Valid	68	68	68	68	68	68
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,1176	4,5147	4,2647	4,2794	4,5588	4,3529
Sum		280,00	307,00	290,00	291,00	310,00	296,00

M1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Tidak Setuju	4	5,9	5,9	5,9

Tidak Setuju	1	1,5	1,5	7,4
Ragu-Ragu	1	1,5	1,5	8,8
Setuju	39	57,4	57,4	66,2
Sangat Setuju	23	33,8	33,8	100,0
Total	68	100,0	100,0	

M2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Ragu-Ragu	2	2,9	2,9	2,9
Setuju	29	42,6	42,6	45,6
Sangat Setuju	37	54,4	54,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

M3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Ragu-Ragu	5	7,4	7,4	8,8
Setuju	37	54,4	54,4	63,2
Sangat Setuju	25	36,8	36,8	100,0
Total	68	100,0	100,0	

M4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Ragu-Ragu	4	5,9	5,9	7,4
Setuju	38	55,9	55,9	63,2
Sangat Setuju	25	36,8	36,8	100,0
Total	68	100,0	100,0	

M5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
--	-----------	---------	---------------	--------------------

	Ragu-Ragu	4	5,9	5,9	5,9
Valid	Setuju	22	32,4	32,4	38,2
	Sangat Setuju	42	61,8	61,8	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

M6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
	Ragu-Ragu	3	4,4	4,4	5,9
Valid	Setuju	35	51,5	51,5	57,4
	Sangat Setuju	29	42,6	42,6	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

C. Penganggaran Publik

Statistics

		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6
N	Valid	68	68	68	68	68	68
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		4,2206	4,4853	4,4118	4,3971	3,9265	3,9559
Sum		287,00	305,00	300,00	299,00	267,00	269,00

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
	Ragu-Ragu	5	7,4	7,4	8,8
Valid	Setuju	40	58,8	58,8	67,6
	Sangat Setuju	22	32,4	32,4	100,0
	Total	68	100,0	100,0	

Y2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ragu-Ragu	4	5,9	5,9	5,9
	Setuju	27	39,7	39,7	45,6

Sangat Setuju	37	54,4	54,4	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	1	1,5	1,5	1,5
Ragu-Ragu	3	4,4	4,4	5,9
Valid Setuju	31	45,6	45,6	51,5
Sangat Setuju	33	48,5	48,5	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Ragu-Ragu	7	10,3	10,3	10,3
Valid Setuju	27	39,7	39,7	50,0
Sangat Setuju	34	50,0	50,0	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	3	4,4	4,4	4,4
Ragu-Ragu	9	13,2	13,2	17,6
Valid Setuju	46	67,6	67,6	85,3
Sangat Setuju	10	14,7	14,7	100,0
Total	68	100,0	100,0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak Setuju	6	8,8	8,8	8,8
Valid Ragu-Ragu	7	10,3	10,3	19,1
Setuju	39	57,4	57,4	76,5

Sangat Setuju	16	23,5	23,5	100,0
Total	68	100,0	100,0	

D. UJI KUALITAS DATA

1. Tekanan Politik

		Correlations						
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	Tekan an Politik
X1.1	Pearson	1	,194	,073	,206	,241*	,215	,471**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		,114	,554	,092	,047	,078	,000
X1.2	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,194	1	,321**	,307*	,238	,261*	,610**
	Correlation							
X1.3	Sig. (2-tailed)	,114		,008	,011	,050	,032	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,073	,321**	1	,285*	,562**	,471**	,732**
X1.4	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,554	,008		,019	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
X1.5	Pearson	,206	,307*	,285*	1	,208	,329**	,574**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,092	,011	,019		,089	,006	,000
X1.6	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,241*	,238	,562**	,208	1	,518**	,737**
	Correlation							
X1.6	Sig. (2-tailed)	,047	,050	,000	,089		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,215	,261*	,471**	,329**	,518**	1	,725**
Tekan an Politik	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,078	,032	,000	,006	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
Tekan an Politik	Pearson	,471**	,610**	,732**	,574**	,737**	,725**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	

N	68	68	68	68	68	68	68
---	----	----	----	----	----	----	----

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,720	6

2. Faktor Demografi

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	Faktor Demografi
X2.1	Pearson Correlation	1	,241*	,277*	,345**	,341**	,069	,524**
	Sig. (2-tailed)		,048	,022	,004	,004	,575	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
X2.2	Pearson Correlation	,241*	1	,567**	,357**	,212	,230	,634**
	Sig. (2-tailed)	,048		,000	,003	,082	,060	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
X2.3	Pearson Correlation	,277*	,567**	1	,591**	,204	,343**	,741**
	Sig. (2-tailed)	,022	,000		,000	,096	,004	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
X2.4	Pearson Correlation	,345**	,357**	,591**	1	,291*	,367**	,743**
	Sig. (2-tailed)	,004	,003	,000		,016	,002	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
X2.5	Pearson Correlation	,341**	,212	,204	,291*	1	,386**	,637**
	Sig. (2-tailed)							

	Sig. (2-tailed)	,004	,082	,096	,016		,001	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	,069	,230	,343**	,367**	,386**	1	,661**
X2.6	Sig. (2-tailed)	,575	,060	,004	,002	,001		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson Correlation	,524**	,634**	,741**	,743**	,637**	,661**	1
Fakt	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
or								
Dem								
ogra								
fi	N	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,733	6

3. Literasi Keuangan

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Literasi Keuangan
	Pearson Correlation	1	,296*	,633**	,491**	,479**	,735**
X3.1	Sig. (2-tailed)		,014	,000	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68

X3.2	Pearson	,296*	1	,541**	,516**	,505**	,717**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,014		,000	,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68
X3.3	Pearson	,633**	,541**	1	,596**	,538**	,840**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68
X3.4	Pearson	,491**	,516**	,596**	1	,629**	,831**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	68	68	68	68	68	68
X3.5	Pearson	,479**	,505**	,538**	,629**	1	,807**
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	68	68	68	68	68	68
Literasi Keuangan	Pearson	,735**	,717**	,840**	,831**	,807**	1
	Correlation						
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,846	5

4. Good Government Governance

Correlations

		M1	M2	M3	M4	M5	M6	Good Government Governance
M1	Pearson	1	,166	,113	-,044	,201	,183	,460**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		,176	,358	,721	,100	,135	,000

M2	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,166	1	,477**	,485**	,393**	,558**	,735**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,176		,000	,000	,001	,000	,000
M3	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,113	,477**	1	,413**	,307*	,537**	,692**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,358	,000		,000	,011	,000	,000
M4	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	-,044	,485**	,413**	1	,581**	,473**	,693**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,721	,000	,000		,000	,000	,000
M5	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,201	,393**	,307*	,581**	1	,436**	,712**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,100	,001	,011	,000		,000	,000
M6	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,183	,558**	,537**	,473**	,436**	1	,766**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,135	,000	,000	,000	,000		,000
Good Government Governance	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,460**	,735**	,692**	,693*	,712**	,766**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,740	6

5. Penganggaran Publik

Correlations

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Penganggaran Publik
--	----	----	----	----	----	----	---------------------

Y1	Pearson	1	,484**	,421**	,554**	,278*	,435**	,782**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,022	,000	,000
Y2	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,484**	1	,578**	,505**	,015	,276*	,688**
	Correlation							
Y3	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,901	,023	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,421**	,578**	1	,643**	,002	,198	,686**
Y4	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,987	,105	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
Y5	Pearson	,554**	,505**	,643**	1	,098	,217	,734**
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,426	,075	,000
Y6	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,278*	,015	,002	,098	1	,390**	,460**
	Correlation							
Y7	Sig. (2-tailed)	,022	,901	,987	,426		,001	,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,435**	,276*	,198	,217	,390**	1	,667**
Y8	Correlation							
	Sig. (2-tailed)							
	N							

Penganggaran Publik	Sig. (2-tailed)	,000	,023	,105	,075	,001		,000
	N	68	68	68	68	68	68	68
	Pearson	,782**	,688**	,686**	,734**	,460**	,667**	1
	Correlation							
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	68	68	68	68	68	68	68

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,747	6

E. UJI REGRESI BERGANDA

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,724 ^a	,524	,502	1,92904

a. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan, Tekanan Politik, Faktor Demografi

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262,122	3	87,374	23,480	,000 ^b
	Residual	238,158	64	3,721		
	Total	500,279	67			

a. Dependent Variable: Penganggaran Publik

b. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan, Tekanan Politik, Faktor Demografi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

IJAZAH

SEKOLAH MENENGAH ATAS
PROGRAM ILMU PENGETAHUAN ALAM
TAHUN PELAJARAN 2014/2015

MAN PEMUDA DAN REMAJA
SMAN 1 TAPALANG
KABUPATEN MANUJUNG
MAMUJU
MUSTAFA, S.P.
NIP. 19710327 199512 1 002

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Atas

Negeri 1 Tapalang, Mamuju menerangkan bahwa:

nama : SITI NURHALIZA
tempat dan tanggal lahir : Tapalang, 20 Mei 1997
nama orang tua/wali : MAHMUD MUIN
nomor induk siswa : 12103
nomor induk siswa nasional : 9975876798
nomor peserta ujian nasional : 3-15-32-01-003-050-7
sekolah asal : SMA Negeri 1 Tapalang

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mamuju, 15 Mei 2015



MUSTAFA, S.P.
NIP. 19710327 199512 1 002

DN-32 Ma 0000284



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal penelitian saudara Siti Nurhaliza, NIM: 90400115086, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **“PENGARUH TEKATAN POLITIK, FAKTOR DEMOGRAFI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP PENGANGGARAN PUBLIK DENGAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU) ”**, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke **Ujian Proposal**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Desember 2019

Pembimbing I

Dr. Lince Bulutoding, SE., M.Si. Ak
NIP. 197505202 01101 2 004

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
NIP. 19720421 200801 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal penelitian saudara **Siti Nurhaliza, NIM: 90400115086**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, **"PENGARUH TEKANAN POLITIK, FAKTOR DEMOGRAFI DAN LITERASI KEUANGAN TERHADAP PENGANGGARAN PUBLIK DENGAN GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN MAMUJU) "**, memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke **Ujian Hasil**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata-Gowa, Maret 2020

Pembimbing I

Dr. Linde Bulutoding, SE., M.Si. Ak
NIP. 197505202 01101 2 004

Pembimbing II

Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si
NIP. 19720421 200801 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : R. H. M. Yasin Binja Rongpoleng - Gowa . ■ 424815, Telp 0412

PERSETUJUAN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Nama : Siti Nurhaliza
Nim : 90400115086
Jurusan : Akuntansi
Judul : Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan *Good Government Governance* sebagai variabel Moderasi (studi kasus pada pemerintah Kab. Mamuju)

Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, kami selaku penguji dan pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan pada Ujian MUNAQASYAH.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut

Samata - Gowa, Maret 2020

DOSEN PENGUJI DAN PEMBIMBING

Penguji I : Dr. Syaharuddin, M.Si.

Penguji II : Jamaluddin M, SE.,M.Si.

Pembimbing I : Dr.Lince Bulutoding, SE., M.Si, Ak.

Pembimbing II: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *370* /EB.IPP.00.9/2/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, *06* Februari 2020

Kepada,

Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Mamuju
Di-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersbut namanya dibawah ini:

Nama : **Siti Nurhaliza**
NIM : **9040015086**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Akuntansi**
Semester : **X (Sepuluh)**
Alamat : **Tamalarea, Perumahan BTP Blok E No.13**

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Pengaruh Tekanan Politik, Faktor Demografi dan Literasi Keuangan terhadap Penganggaran Publik dengan Good Government Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kab. Mamuju)"

Dengan Dosen pembimbing: **1. Dr. Lince Bulutoding, SE., M.SI., Ak.,CA**
2. Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di Kantor Pemerintah Kab.Mamuju.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIM. 19661130 199303 1 003

Tembusan:

RIWAYAT HIDUP



SITI NURHALIZA, lahir di Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 20 MEI tahun 1997. Penulis merupakan anak Pertama (Sulung) dari dua bersaudara, buah hati dari Ayahanda Mahmud Muin dan Ibunda Cheristina. Tempat tinggal penulis di Kelurahan Dayanginna, Kecamatan Tapalang Kab. Mamuju.

Penulis mulai masuk ke dunia

pendidikan itu pada tahun 2004 di SD Taan Galung dan lulus pada tahun 2009. Setelah lulus penulis melanjutkan pendidikan di SMP NEGERI 1 Tapalang dan lulus pada tahun 2012. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA NEGERI 1 Tapalang dan Alhamdulillah lulus pada tahun 2015. Setelah itu penulis kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan mengambil Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonoi dan Bisnis Islam

Contact Person

Email : Lizanakakuntansi@gmail.com

IG : Lizzaaaaa.aa

FB : Siti Nurhalizzah